

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INDEKS *E-
GOVERNMENT*, UMUR PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN
AUDIT, DAN *LEVERAGE* TERHADAP KEMANDIRIAN
FISKAL DAERAH**

(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)



SKRIPSI

Oleh :

Nama: Askia Kusuma Putri Andini

No. Mahasiswa: 22312156

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INDEKS *E-GOVERNMENT*, UMUR
PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT, DAN *LEVERAGE*
TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia (UII)

Oleh :

Nama: Askia Kusuma Putri Andini

No. Mahasiswa: 22312156

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun adalah hasil karya asli saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang telah dicantumkan secara tertulis sebagai acuan dalam naskah ini serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 20 April 2026



(Askia Kusuma Putri Andini)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INDEKS *E-GOVERNMENT*, UMUR
PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT, DAN *LEVERAGE*
TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama: Askia Kusuma Putri Andini

No. Mahasiswa: 22312156

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 17 April 2026

Dosen Pembimbing,



(Prof. Johan Arifin, SE, M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INDEKS E-GOVERNMENT, UMUR PEMERINTAH DAERAH,
TEMUAN AUDIT, DAN LEVERAGE TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH (Studi pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Disusun oleh : ASKIA KUSUMA PUTRI ANDINI

Nomor Mahasiswa : 22312156

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 05 Mei 2026

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

HALAMAN MOTTO

“..... Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah : 216)

“Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang mempunyai proses dan rezeki-Nya masing-masing.”

(Q.S Maryam : 4)

“Hidup adalah ruang belajar yang tidak pernah selesai. Kadang kita melukai, kadang kita terluka. Setiap manusia pernah salah melangkah, keliru mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tetapi hidup bukan tentang sempurna, melainkan dari seberapa besar kita mau belajar, memaafkan, dan bertumbuh.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur atas rahmat Allah SWT,
saya mempersembahkan skripsi ini sebagai wujud dedikasi
untuk diri saya sendiri,
kedua orang tua,
serta adik saya yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa henti.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat, kemudahan, dan kesempatan yang diberikan hingga akhirnya skripsi yang berjudul “**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INDEKS *E-GOVERNMENT*, UMUR PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT, DAN *LEVERAGE* TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)**” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam turut penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk mengikuti teladan dan memperoleh syafa'atnya kelak.

Selama menempuh masa studi dan menjalani proses penulisan skripsi ini, penulis beruntung mendapatkan banyak dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang dalam dan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Johan Arifin, SE, M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

sekaligus dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis, memberikan arahan, saran, dan koreksi yang sangat membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

3. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
5. Segenap dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Segenap staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas bantuan, informasi, dan pelayanan administrasi yang diberikan dengan baik selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas setiap doa, setiap pengorbanan yang mungkin tidak pernah penulis sadari sepenuhnya, dan setiap harapan yang selalu Bapak dan Ibu titipkan dalam langkah penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang dan penuh berkah, mengabulkan doa Bapak dan Ibu, serta senantiasa melindungi di mana pun berada. Besar harapan penulis agar setiap usaha ini dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi Bapak dan Ibu.
8. Kanya Dewi Rahma Affandi, adik kandung penulis yang selalu menjadi penyemangat ketika lelah, mendorong penulis untuk terus belajar serta berusaha menjadi kakak yang positif di segala hal.

9. Raras Putri Utami dan Dwi Siwi Susilowati selaku teman baik penulis selama masa perkuliahan yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan menyemangati penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya.
11. Peneliti skripsi ini, diri saya sendiri, Askia Kusuma Putri Andini. Terima kasih telah berusaha sebaik mungkin, tetap bangkit saat merasa lelah, dan tetap percaya bahwa semuanya akan selesai pada waktunya. Tidak apa-apa jika lambat, yang terpenting tidak berhenti. *I believe in myself.*

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan maupun yang membacanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 17 April 2026

Penulis



(Askia Kusuma Putri Andini)

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Judul.....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Institusional (Institutional Theory).....	12
2.1.2 Teori Agensi (Agency Theory)	16
2.1.3 Jumlah Penduduk.....	18
2.1.4 Indeks E-Government.....	20
2.1.5 Umur Pemerintah Daerah	25
2.1.6 Temuan Audit.....	27
2.1.7 Leverage.....	30
2.1.8 Kemandirian Fiskal Daerah	33
2.1.9 Luas Daerah	36
2.1.10 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	37

2.2 Penelitian Terdahulu	39
2.3 Hipotesis Penelitian	45
2.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah	45
2.3.2 Pengaruh Indeks E-Government Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.	46
2.3.3 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.	48
2.3.4 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah	49
2.3.5 Pengaruh Leverage Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah	50
2.4 Kerangka Pemikiran	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	54
3.2.1 Populasi	54
3.2.2 Sampel	55
3.3 Deskripsi Objek Penelitian	56
3.4 Definisi Operasional Variabel	57
3.4.1 Variabel Dependen	57
3.4.2 Variabel Independen	58
3.4.3 Variabel Kontrol	62
3.5 Metode Analisis Data	64
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif	64
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	64
3.5.3 Uji Regresi Linear Berganda	66
3.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
3.5.5 Uji Parsial (Uji T)	68
BAB IV ANALISA DATA & PEMBAHASAN	69
4.1 Analisis Uji Statistik Deskriptif	71
4.2 Analisis Uji Asumsi Klasik	74
4.2.1 Uji Normalitas	74
4.2.2 Uji Multikolinearitas	75
4.2.3 Analisis Uji Heteroskedastisitas	77
4.3 Analisis Uji Regresi Linear Berganda	79
4.4 Analisis Uji Koefisien Determinasi (R^2)	81
4.5 Analisis Uji Hipotesis	82

4.5.1 Uji T.....	82
4.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	85
4.6.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.....	85
4.6.2 Pengaruh Indeks E-Government terhadap Kemandirian Fiskal Daerah	87
4.6.3 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.....	89
4.6.4 Pengaruh Temuan Audit terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.....	91
4.6.5 Pengaruh Leverage terhadap Kemandirian Fiskal Daerah	93
BAB V PENUTUP.....	95
5.1 Kesimpulan Penelitian.....	95
5.2 Keterbatasan Penelitian	97
5.3 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pola Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	35
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3. 1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	63
Tabel 4. 1 Perbandingan Hasil Uji Data	70
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	71
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas	75
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas	76
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	78
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda	79
Tabel 4. 7 Hasil Uji R^2	81
Tabel 4. 8 Hasil Uji T	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Elemen ITPOSMO	21
Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Kabupaten & Kota.....	109
Lampiran 2 Daftar Jumlah Penduduk	114
Lampiran 3 Daftar Indeks <i>E-Government</i>	119
Lampiran 4 Daftar Umur Pemerintah Daerah.....	124
Lampiran 5 Daftar Temuan Audit	129
Lampiran 6 Daftar Leverage	134
Lampiran 7 Daftar Luas Daerah.....	139
Lampiran 8 Daftar Tingkat Pendidikan Kepala Daerah.....	144
Lampiran 9 Kemandirian Fiskal Daerah	149
Lampiran 10 Hasil Uji Statistik Deskriptif	163
Lampiran 11 Hasil Uji Asumsi Klasik	164
Lampiran 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	167
Lampiran 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	168
Lampiran 14 Hasil Uji T	169

ABSTRAK

This study aims to analyze the influence of population size, e-government index, local government age, audit findings, and leverage on regional fiscal independence. The population of this study consists of all district and city governments in Indonesia 2024. The sampling technique used in this research is non-probability sampling with a purposive sampling approach. The research results obtained show that population size, e-government index, local government age, and leverage have a positive and significant effect on regional fiscal independence. Meanwhile, audit findings have a negative and significant effect on regional fiscal independence. In addition, the control variables, namely regional area size and the education level of the regional head, do not have a significant effect on regional fiscal independence.

Keywords: *regional fiscal independence, population size, e-government index, local government age, audit findings, leverage.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian fiskal daerah masih menjadi persoalan utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Hingga saat ini, sebagian besar pemerintah daerah belum mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri karena masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri mengungkapkan bahwa dari total 546 daerah di Indonesia, sebanyak 493 daerah masih masuk dalam kategori kapasitas fiskal rendah. Daerah-daerah tersebut terdiri atas 15 provinsi, 402 kabupaten, dan 70 kota yang pendapatan daerahnya masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat (Madjid, 2025). Situasi ini makin berat setelah pemerintah pusat mulai menerapkan kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2025.

Hingga 30 September 2025, realisasi TKD telah mencapai Rp 644,9 triliun, meningkat dari periode serupa tahun sebelumnya sebesar Rp 635,6 triliun (Saptati, 2025). Meski penyaluran dana cukup besar, efektivitas pemanfaatannya meragukan. Pada akhir Agustus 2025, tercatat saldo dana pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp 233,1 triliun (Ramandhita, 2025). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang sudah dikucurkan belum digunakan untuk realisasi belanja dan pembangunan. Selain laporan

BPK, data Kementerian Keuangan mengenai kemandirian fiskal daerah juga memperlihatkan bahwa kategori kemandirian sedang dan baik jumlahnya belum mencapai setengah. Beberapa daerah bahkan mencatat PAD di bawah Rp100 miliar per tahun, dan Mamberamo Tengah tercatat hampir seluruh pendapatannya berasal dari TKD (Simanjuntak, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kemampuan daerah dalam mengelola pendapatannya dengan kebutuhan layanan publik yang terus meningkat.

Arah kebijakan fiskal pusat dan daerah sebenarnya sudah diatur ulang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Revisi ini terkait UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, kerangka fiskal antara pusat dan daerah di Indonesia disusun ulang dengan harapan memperkuat kemandirian daerah. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penyaluran TKD diarahkan untuk mendukung pemerataan pelayanan publik di daerah (Kemenkeu, 2025b).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kemandirian fiskal daerah tidak hanya berakar pada kondisi ekonomi, tetapi juga pada cara pemerintah daerah menjalankan tata kelola pemerintahannya. Teori institusional menjelaskan bahwa suatu organisasi terbentuk dan berkembang karena adanya tekanan dari lingkungan institusional di

sekitarnya (Nadila *et al.*, 2021). Tekanan tersebut mendorong organisasi untuk menyesuaikan diri sehingga proses institusionalisasi dapat terjadi. Tekanan dari lingkungan institusional tersebut membuat pemerintah daerah sering kali lebih fokus pada pemenuhan aturan formal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti penyusunan APBD, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi fiskal. Dalam praktiknya, kepatuhan ini tidak selalu diikuti dengan upaya nyata untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bukti yang mendukung teori tersebut, misalnya penelitian Sunandar (2023) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan kepala daerah, dan usia pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui *institutional isomorphism*. Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan regulasi, peniruan praktik daerah yang lebih maju, serta tuntutan profesionalisme birokrasi berperan dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Selaras dengan itu, teori agensi dinyatakan bahwa dalam hubungan pusat dan daerah terdapat potensi konflik kepentingan antara pihak pemberi mandat (pemerintah pusat) dan pihak pelaksana (pemerintah daerah) sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan kontrol untuk mencegah penyimpangan penggunaan anggaran. Penelitian oleh Putri & Priyadi (2021) menunjukkan temuan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan

leverage dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Salah satu faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal daerah adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar pada dasarnya menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi di suatu daerah. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, peluang untuk menarik pajak daerah dan retribusi juga semakin besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Shafira (2024) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk dapat memperluas penerimaan daerah melalui peningkatan pajak dan kontribusi ekonomi masyarakat. Daerah dengan penduduk banyak juga memiliki kebutuhan pelayanan publik yang lebih besar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Penelitian Rofiq & Arza (2021) juga menemukan temuan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah karena mampu memperkuat potensi fiskal daerah.

Umur pemerintah daerah menunjukkan seberapa lama suatu daerah berdiri dan menjalankan aktivitas pemerintahan. Dalam konteks kemandirian fiskal, pemerintah daerah yang sudah berumur lebih tua umumnya memiliki pengalaman birokrasi yang lebih matang, sistem administrasi keuangan yang lebih tertata, serta kapasitas aparatur yang lebih terlatih dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Kondisi tersebut dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, sehingga kemandirian keuangan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Rofiq dan Arza (2021) yang menyatakan bahwa usia pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian fiskal. Semakin lama suatu daerah berdiri, semakin besar pengalaman yang dimiliki akan membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik.

Indeks *e-government* merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pengelolaan administrasi keuangan. Semakin tinggi implementasi *e-government*, maka proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan keuangan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel (Hasyim & Ilham, 2025). Efisiensi tersebut dapat memperbaiki kualitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, sehingga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Temuan audit menunjukkan tingkat kepatuhan dan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan sesuai regulasi serta prinsip akuntabilitas. Banyaknya temuan audit menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal yang menjadi penghambat dalam optimalisasi pendapatan daerah (Silalahi & Nuswantara, 2024). Kondisi ini berdampak buruk terhadap kemampuan daerah mengelola keuangannya secara mandiri karena anggaran tidak digunakan secara produktif dan berpotensi menimbulkan ketergantungan yang lebih besar

terhadap dana transfer pusat. Penelitian oleh (Amyulianthy *et al.*, 2020) menemukan bahwa semakin banyak temuan audit, semakin rendah tingkat kemandirian fiskal daerah akibat lemahnya manajemen anggaran dan rendahnya kualitas tata kelola.

Leverage menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tingkat *leverage* yang optimal dapat membantu daerah memperluas kapasitas pembiayaan proyek produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung kemandirian fiskal. Hasil penelitian Adinata & Efendi (2022) menunjukkan temuan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, *leverage* yang terlalu tinggi menunjukkan tingginya ketergantungan pada utang untuk menutupi belanja, sehingga dapat menimbulkan tekanan fiskal jangka panjang dan menurunkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian Putri & Priyadi (2021) menunjukkan temuan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini mengindikasikan bahwa penggunaan utang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, isu ini penting untuk diteliti karena berdampak langsung pada keberlanjutan pelayanan publik dan kemampuan daerah dalam merencanakan program jangka panjang.

Meskipun urgensi topik tersebut tinggi, masih terdapat keterbatasan pada penelitian sebelumnya yang perlu diperbaiki pada penelitian ini.

Banyak penelitian sebelumnya hanya menguji dua hingga tiga faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal daerah tanpa memasukkan variabel lain yang juga relevan, misalnya, penelitian Humaira & Widyawati (2025) hanya menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, tanpa mempertimbangkan faktor penting lain seperti temuan audit maupun indeks *e-government* yang kini semakin berperan dalam tata kelola keuangan daerah. Di sisi lain, penelitian Adinata & Efendi (2022) hanya berfokus pada *leverage*, ukuran pemerintah daerah, dan dana perimbangan tanpa memasukkan variabel lain seperti jumlah penduduk dan umur pemerintah daerah yang juga berpotensi memengaruhi tingkat kemandirian fiskal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah, salah satunya penelitian Rofiq & Arza (2021) yang menelaah pengaruh ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, status pemerintah daerah, jumlah penduduk, jumlah SKPD, belanja pegawai dan *leverage* terhadap kemandirian keuangan daerah. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini menambahkan variabel indeks *e-government* dan temuan audit sebagai variabel independen. Selain itu, peneliti juga menambahkan teori yang berbeda, yaitu teori institusional.

Indeks *e-government* ditambahkan karena pemanfaatan teknologi informasi mendorong pelayanan publik yang lebih terbuka, efisien, dan terintegrasi, sedangkan temuan audit menunjukkan kualitas pengelolaan

keuangan dan kepatuhan yang berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. Penambahan teori institusional menegaskan bahwa kemandirian fiskal tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga tekanan regulasi, norma, dan tuntutan legitimasi yang mendorong pemerintah daerah memperbaiki tata kelola keuangan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INDEKS *E-GOVERNMENT*, UMUR PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT, DAN *LEVERAGE* TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah?
2. Apakah indeks *e-government* berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah?
3. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah?
4. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian fiskal daerah.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *e-government* terhadap kemandirian fiskal daerah.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kemandirian fiskal daerah.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh temuan audit terhadap kemandirian fiskal daerah.
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *leverage* terhadap kemandirian fiskal daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan mengenai keuangan daerah, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal daerah. Hasil penelitian ini juga dapat memperluas wawasan mahasiswa dan akademisi tentang jumlah penduduk, indeks *e-government*, umur pemerintah daerah, temuan

audit, dan *leverage* dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik terkait kemandirian fiskal atau pengelolaan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian fiskal sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti mengoptimalkan penggunaan *e-government*, dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan bidang pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari laporan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, populasi & sampel penelitian, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan hasil pengolahan data serta rangkaian pengujian yang telah dilaksanakan. Bab ini juga akan membahas mengenai hasil uji yang telah dilakukan tersebut bersama dengan temuan yang ada.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Institusional (Institutional Theory)

Teori institusional menjelaskan hubungan antara organisasi dan lingkungannya, serta bagaimana struktur, proses, dan pengambilan keputusan organisasi dibentuk oleh tekanan dan aturan yang berlaku dalam lingkungan kelembagaannya (Meyer & Rowan, 1977). Lingkungan eksternal tidak hanya memengaruhi cara organisasi bekerja, tetapi juga menentukan bentuk legitimasi yang harus dipenuhi agar organisasi dapat diterima secara sosial (Munawaroh & Sari, 2025). Oleh karena itu, organisasi sektor publik membutuhkan kemauan dan komitmen untuk menyesuaikan diri dengan aturan, keyakinan, dan ekspektasi lingkungan demi tercapainya tujuan kebijakan publik.

2.1.1.1 Isomorfisme Institusional

Hawley (1968) sebagaimana dikutip oleh DiMaggio dan Powell (1983), isomorfisme adalah proses di mana suatu unit dalam suatu kelompok menyesuaikan diri agar mirip dengan unit lain ketika mereka berada dalam kondisi lingkungan yang serupa. Dengan kata lain, perubahan tersebut bersifat memaksa karena organisasi merespons tuntutan untuk mengikuti praktik yang diakui secara luas sebagai standar.

Isomorfisme menjadi kerangka yang banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku organisasi publik, termasuk praktik transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan (Arifin, 2024). Ini menekankan bahwa organisasi tidak hanya bersaing untuk sumber daya dan pemangku kepentingan, tetapi juga untuk memperoleh legitimasi institusional dan posisi sosial dalam lingkungannya (DiMaggio & Powell, 1983 dalam Kisworo & Shauki, 2019). Selain itu, isomorfisme ini telah banyak digunakan dalam studi sektor publik untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelaporan keuangan dan tata kelola pemerintahan (Aksom & Tymchenko, 2020). Dalam perkembangannya, terdapat dua kategori dasar isomorfisme, yaitu:

1. *Competitive Isomorphism* (Isomorfisme Kompetitif)

Konsep ini berasal dari rasionalitas sistem pasar yang menekankan persaingan, perubahan karakteristik pasar, serta tuntutan efisiensi. Persaingan bebas mendorong organisasi untuk meniru pola organisasi lain yang dianggap kompetitif agar dapat bertahan.

2. *Institutional Isomorphism* (Isomorfisme Institusional)

Konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana organisasi mengadopsi praktik kelembagaan tertentu demi mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari lingkungan institusionalnya (Dimaggio & Powell, 1983).

DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme isomorfisme dalam perubahan organisasi, yaitu:

1. Isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*), yaitu kondisi dimana terjadi perubahan praktik institusional dalam suatu organisasi terutama karena adanya tekanan dari para stakeholder yang memiliki pengaruh dan menjadi tumpuan ketergantungan organisasi. Dalam konteks kemandirian fiskal daerah, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan PAD, memperbaiki tata kelola keuangan, serta mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Tuntutan tersebut mendorong daerah untuk memperbaiki sistem pajak dan retribusi serta mengelola keuangan secara lebih tertib dan akuntabel, sehingga kemandirian fiskal dapat semakin meningkat.
2. Isomorfisme mimetik (*mimetic isomorphism*), yaitu kondisi yang menggambarkan situasi ketika organisasi memilih meniru praktik organisasi lain yang sejenis dan dianggap berhasil, terutama dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian dan minim pedoman yang jelas. Daerah yang masih memiliki kemandirian fiskal rendah biasanya meniru kebijakan dari daerah lain yang dinilai berhasil meningkatkan PAD, misalnya melalui penerapan digitalisasi pajak, pengembangan inovasi layanan publik, atau pemanfaatan aset daerah secara lebih

optimal. Peniruan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang bertujuan memperkuat kemampuan fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

3. Isomorfisme normatif (*normative isomorphism*), yaitu kondisi dari norma kelompok yang mendorong organisasi untuk mengikuti praktik-praktik yang dianggap lazim, sehingga organisasi cenderung mengadopsi praktik institusional tertentu agar terlihat sesuai dan tidak berbeda dari organisasi lain. Dalam teori institusional, pemerintah daerah dipandang sebagai organisasi yang perilaku dan cara kerjanya banyak dipengaruhi oleh norma dan standar profesional yang berkembang di lingkungan birokrasi. Kesamaan ini membentuk pola pikir dan cara kerja yang serupa dalam mengelola keuangan daerah. Isomorfisme normatif mendorong aparatur pemerintah daerah untuk bekerja mengikuti prinsip tata kelola keuangan yang baik. Aparatur tidak hanya fokus pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mulai memperhatikan efektivitas perencanaan anggaran, ketepatan pengelolaan pendapatan, serta pengendalian belanja daerah. Seiring waktu, hal ini membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih rapi dan terarah. Ketika pengelolaan keuangan daerah semakin tertata, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber

keuangannya sendiri juga ikut meningkat. Aparatur yang kompeten lebih mampu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyusun kebijakan anggaran yang sesuai dengan kondisi daerah. Proses ini membantu daerah mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

2.1.2 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan digunakan untuk memahami hubungan antara pihak yang memberi wewenang (principal) dan pihak yang menerima wewenang untuk menjalankan aktivitas perusahaan (agent). Meckling & Jensen (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika pemilik perusahaan atau investor (principal) memberikan wewenang kepada manajer (agent) untuk membuat keputusan serta mengelola perusahaan demi mencapai tujuan organisasi. Keputusan, informasi, dan laporan yang dihasilkan oleh manajemen kemudian menjadi dasar bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan ekonomi.

Hubungan antara principal dan agent dapat berjalan saling menguntungkan karena keduanya berkepentingan terhadap kemajuan perusahaan. Namun kenyataannya, hubungan tersebut sering menimbulkan konflik keagenan (*agency problem*) karena manajemen tidak selalu bertindak selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan. Konflik muncul karena manajer sebagai individu memiliki motivasi untuk mengutamakan keuntungan pribadi dibanding kesejahteraan pemegang saham.

Eisenhardt (1989) dalam Hendrastuti & Harahap (2023) menjelaskan bahwa konflik dalam hubungan keagenan dipengaruhi oleh tiga sifat dasar manusia, yaitu: (1) *Self-interest* yaitu kecenderungan manusia bertindak berdasarkan kepentingan pribadi; (2) *Bounded rationality* yaitu keterbatasan individu dalam memprediksi kondisi masa depan secara pasti; dan (3) *Risk averse* yaitu kecenderungan menghindari risiko. Ketiga sifat tersebut membantu manajer bertindak oportunistis karena memiliki kontrol dan akses informasi yang lebih besar dibanding pemegang saham, sehingga dapat menyembunyikan informasi penting demi keuntungan pribadi. Ketidakseimbangan informasi seperti ini dikenal sebagai *asymmetric information*.

Menurut Maria & Halim (2021), hubungan keagenan tidak hanya terjadi di sektor swasta, tetapi juga dalam organisasi sektor publik. Dalam pemerintahan, hubungan ini terlihat antara masyarakat dan pemerintah, di mana masyarakat berperan sebagai pihak yang memberi mandat, sedangkan pemerintah bertugas menjalankan amanah tersebut. Selain itu, hubungan keagenan juga muncul antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan tertentu, namun pelaksanaannya tetap harus dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah pusat (Oktavianti & Idayati, 2020).

Dalam praktiknya, hubungan ini sangat terlihat pada kinerja keuangan daerah, khususnya dalam upaya pemerintah daerah mencapai kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat yang harus dipertanggungjawabkan kembali kepada pihak pusat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu memaksimalkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Hubungan keagenan dalam sektor publik, khususnya pemerintahan terlihat jelas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya keuangan lainnya. Meskipun pemerintah daerah memiliki wewenang, keputusan finansial daerah tetap berada dalam kerangka regulasi pusat sebagai prinsipal, sehingga setiap kebijakan fiskal yang dijalankan harus sejalan dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

2.1.3 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang telah menetap selama satu tahun atau lebih maupun mereka yang belum genap satu tahun tetapi berencana untuk menetap dalam jangka waktu yang relatif lama (BPS, 2020). Menurut (Bahl *et al.*, 1992), ukuran populasi daerah berhubungan erat dengan tingkat kompleksitas pelayanan publik dan kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk, semakin beragam tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, infrastruktur, serta kualitas tata

kelola pemerintahan. Jumlah penduduk tidak hanya dipandang sebagai indikator demografis, tetapi juga sebagai gambaran lingkungan tempat pemerintah daerah menjalankan fungsinya.

Dalam perspektif teori institusional, organisasi publik, termasuk pemerintah daerah dipengaruhi oleh tekanan lingkungan untuk menyesuaikan struktur dan praktiknya agar memperoleh legitimasi (Saripudin, 2025). Daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung menghadapi tekanan publik yang lebih kuat, baik dalam bentuk tuntutan transparansi, akuntabilitas, maupun kualitas pelayanan. Tekanan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi praktik pengelolaan pemerintahan yang dianggap wajar dan sah secara sosial, sehingga selaras dengan konsep *institutional isomorphism* sebagaimana dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (1983).

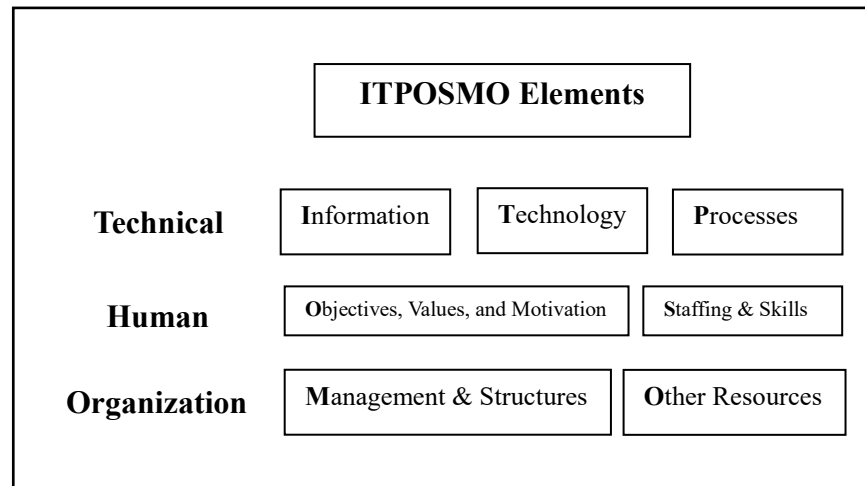
Dari sudut pandang isomorfisme koersif, jumlah penduduk berpotensi mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah, sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan daerah (Musgrave & Musgrave, 1980). Namun, jumlah penduduk yang besar juga meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah terdorong untuk menyesuaikan strategi pengelolaan keuangannya agar tetap mampu memenuhi tuntutan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.

2.1.4 Indeks E-Government

E-Government didefinisikan sebagai optimasi penyediaan layanan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi, internet, dan media baru untuk mentransformasikan hubungan internal maupun eksternal (Gartner, 2000 dalam Napitupulu *et al.*, 2020). Indeks *e-Government* atau indeks tingkat kematangan (*maturity level*) SPBE merupakan nilai yang menunjukkan sejauh mana pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi pusat dan pemerintah daerah telah berkembang, dilihat dari kapabilitas proses dan layanan yang dimiliki (MenPANRB, 2025).

Heeks (2003) menjelaskan bahwa *e-Government* dapat dipahami sebagai suatu sistem informasi yang menggunakan pendekatan ITPOSMO. ITPOSMO merupakan singkatan dari *Information, Technology, Objective and Values, Staffing and Skills, Management and Structure*, serta *Other Resources*. Pendekatan ini menekankan adanya tujuh komponen utama yang perlu dikelola secara optimal agar penerapan *e-Government* dapat berjalan dengan baik. Menurut Heeks (2003), berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai proyek *e-Government*, ketujuh komponen tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan implementasi *e-Government*. Selanjutnya, ketujuh komponen

tersebut dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu technical, human dan organization.



Gambar 2. 1 Elemen ITPOSMO (OECD, 2015)

Elemen-elemen ITPOSMO sebagaimana dikemukakan oleh Heeks (2003) menggambarkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan *e-Government*, yaitu:

- a) Informasi, yaitu aspek yang berkaitan dengan kualitas data serta kelengkapan input dan output yang dihasilkan oleh sistem.
- b) Teknologi, mencakup ketersediaan serta kesesuaian perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam mendukung sistem e-Government.
- c) Proses, berkaitan dengan penyesuaian dan integrasi antara sistem dengan proses kerja lama maupun baru agar tujuan organisasi dapat tercapai.

- d) Tujuan, nilai, dan motivasi, yang berhubungan dengan budaya organisasi, nilai-nilai yang dianut, serta dorongan internal dalam menerapkan e-Government.
- e) Staf dan keterampilan, menekankan pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan pelatihan yang memadai untuk menjalankan sistem.
- f) Manajemen dan struktur, mencakup pola kepemimpinan, praktik manajerial, serta fleksibilitas struktur organisasi dalam menghadapi perubahan.
- g) Sumber daya lainnya, meliputi dukungan anggaran, waktu, dan fasilitas pendukung lain yang diperlukan agar implementasi proyek dapat berjalan dengan baik.

Perkembangan lingkungan strategis dan dinamika sosial yang semakin kompleks mendorong terjadinya berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan-perubahan tersebut menuntut terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu merespons dinamika perubahan secara efektif.

Secara umum, penerapan *e-Government* dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk utama, yaitu hubungan antara pemerintah dan masyarakat (*Government to Citizen/G2C*), pemerintah dan pelaku usaha (*Government to Business/G2B*), hubungan antarlembaga pemerintahan

(*Government to Government/G2G*), serta hubungan antara pemerintah dan aparatur atau pegawainya (*Government to Employee/G2E*).

- a) *Government to Citizen (G2C)* merupakan bentuk e-Government yang berfokus pada penyediaan informasi dan layanan publik kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan internet. Melalui G2C, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Model ini membantu mempererat hubungan antara pemerintah dan warga, menyederhanakan proses birokrasi, mengurangi potensi praktik korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
- b) *Government to Business (G2B)* adalah model e-Government yang ditujukan untuk mendukung interaksi antara pemerintah dan dunia usaha. G2B menyediakan informasi dan layanan yang dibutuhkan pelaku bisnis, seperti perizinan, pendaftaran usaha, perpajakan, serta regulasi terkait kegiatan ekonomi. Selain itu, G2B juga memfasilitasi kebutuhan pemerintah terhadap produk dan jasa dari sektor swasta, misalnya melalui sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- c) *Government to Government (G2G)* merupakan penerapan e-Government yang menekankan pada koordinasi dan

pertukaran informasi antarinstansi pemerintah. Model ini mencakup hubungan antar lembaga pada tingkat yang sama (horizontal) maupun pada tingkatan pemerintahan yang berbeda (vertikal). Melalui G2G, komunikasi dan kerja sama antarlembaga pemerintah dapat berjalan lebih efektif sehingga mendukung kolaborasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

- d) *Government to Employee (G2E)* adalah model e-Government yang berfungsi mendukung pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. G2E dimanfaatkan untuk meningkatkan komunikasi internal, produktivitas kerja, pengembangan karier, serta pengelolaan hak dan kewajiban pegawai seperti gaji, tunjangan, dan pensiun. Penerapan G2E membantu menciptakan sistem kerja yang lebih efisien dan meningkatkan kepuasan pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Dalam pengembangan *e-Government*, pemerintah daerah sering kali meniru pola dan model layanan digital yang telah lebih dahulu berhasil diterapkan oleh daerah lain, baik dalam pelayanan kepada masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B), koordinasi antarpemerintah (G2G), maupun pengelolaan aparatur (G2E). Praktik peniruan ini sejalan dengan konsep isomorfisme mimetik, yaitu kecenderungan organisasi untuk mencontoh praktik yang dianggap sukses sebagai respons atas ketidakpastian dan

tuntutan lingkungan. Melalui peniruan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh legitimasi, meningkatkan citra kinerja, serta menunjukkan kesesuaian dengan standar nasional maupun praktik terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

Meskipun demikian, keberhasilan *e-Government* tidak cukup hanya dengan menyalin model yang sudah ada. Setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan masyarakat, serta kapasitas yang berbeda. Oleh karena itu, tingkat kemandirian daerah menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penerapan *e-Government*. Pemerintah daerah yang lebih mandiri cenderung mampu menyesuaikan dan mengembangkan layanan digital sesuai dengan kondisi lokal, bukan sekadar meniru secara formal. Dengan adanya kemandirian tersebut, *e-Government* tidak hanya menjadi simbol modernisasi pemerintahan, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.1.5 Umur Pemerintah Daerah

Umur pemerintah daerah menunjukkan lamanya suatu daerah berdiri sejak ditetapkan secara resmi melalui undang-undang pembentukan daerah tersebut (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Semakin lama suatu pemerintah daerah berdiri, semakin banyak pengalaman yang dimiliki dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk cenderung memiliki sistem kerja yang lebih matang, pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi, serta pengalaman yang cukup dalam

mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, pemerintah daerah yang usianya masih relatif muda umumnya masih berada pada tahap penyesuaian, sehingga pengalaman dan rekam jejaknya belum sebanyak daerah yang lebih lama berdiri.

Dari sudut pandang isomorfisme normatif, umur pemerintah daerah berkaitan erat dengan proses pembelajaran dan profesionalisasi birokrasi. Pemerintah daerah yang telah lama berdiri memiliki lebih banyak kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, serta membangun jaringan profesional yang mendorong penerapan norma, standar, dan praktik pemerintahan yang dianggap baik dan lazim digunakan oleh daerah lain (DiMaggio & Powell, 1983). Proses ini membuat pola pengelolaan pemerintahan, termasuk transparansi dan akuntabilitas, menjadi semakin seragam sesuai dengan norma profesional yang berlaku.

Selain itu, umur pemerintah daerah juga memiliki hubungan dengan kemandirian daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Pengalaman yang lebih panjang memungkinkan pemerintah daerah memahami potensi ekonomi wilayahnya, mengelola pendapatan asli daerah secara lebih optimal, serta menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan pengalaman dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik, pemerintah daerah yang lebih tua cenderung memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

2.1.6 Temuan Audit

Audit menurut *A Statement of Basic Auditing Concepts* (ASOBAC) dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk mengumpulkan serta menilai bukti secara objektif atas berbagai aktivitas dan kejadian ekonomi. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pernyataan atau informasi yang disajikan telah sesuai dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, kemudian menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kegiatan pengauditan terdapat lima komponen utama, yaitu:

1. Proses yang sistematis

Audit diawali dengan perencanaan dan penyusunan strategi yang jelas. Seluruh tahapan audit, mulai dari pemilihan hingga penilaian bukti, dilakukan secara terstruktur dan disesuaikan dengan rencana, strategi, serta tujuan audit yang telah ditetapkan.

2. Perolehan dan evaluasi bukti secara objektif

Pengumpulan dan penilaian bukti merupakan bagian paling utama dalam proses audit. Auditor harus memastikan bahwa bukti yang diperoleh cukup, relevan, dan dinilai secara objektif untuk mendukung hasil pemeriksaan.

3. Asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi

Objek audit adalah laporan keuangan historis serta pernyataan atau

asersi yang dibuat oleh manajemen terkait aktivitas dan kejadian ekonomi yang terjadi dalam organisasi.

4. Penilaian tingkat kepatuhan terhadap kriteria Audit dilakukan untuk menilai sejauh mana asersi manajemen telah sesuai dengan standar, aturan, atau kriteria yang berlaku.

5. Penyampaian hasil kepada pihak yang berkepentingan Hasil akhir dari proses audit adalah laporan audit yang berisi informasi mengenai tingkat kesesuaian antara asersi manajemen dengan kriteria tertentu, yang digunakan oleh para pengguna sebagai dasar dalam melakukan penilaian dan pengambilan keputusan.

Soltani dalam Sudrajat (2023) menjelaskan bahwa kualitas audit menunjukkan sejauh mana auditor mampu menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji mencerminkan tingkat kompetensi yang dimiliki, sedangkan keberanian untuk melaporkan salah saji tersebut berkaitan dengan etika dan integritas auditor, khususnya sikap independensi. Audit harus dilakukan oleh auditor atau lembaga yang memiliki kompetensi dan independensi yang memadai. Hal ini disebabkan karena hasil audit atas laporan keuangan akan digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Jannah (2021), auditor yang berkualitas adalah auditor yang memiliki kemampuan untuk menemukan adanya pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kualitas audit ditentukan oleh dua unsur utama. Pertama, kemampuan auditor dalam mengidentifikasi pelanggaran atau permasalahan dalam sistem akuntansi klien, yang dipengaruhi oleh pengetahuan yang relevan, pengalaman kerja, serta pendidikan yang dimiliki auditor. Kedua, independensi auditor, yang sangat penting untuk menjaga objektivitas auditor agar tidak memihak, khususnya kepada manajemen, mengingat informasi hasil audit akan digunakan oleh masyarakat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Temuan audit dapat dipahami sebagai tanda adanya ketidaksesuaian antara praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan aturan atau standar yang seharusnya dijalankan. Siregar & Agoes (2025) menjelaskan bahwa temuan audit sering kali menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk potensi tindakan yang merugikan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan Rosyidah & Wijaya (2025) yang menyebutkan bahwa temuan audit muncul ketika auditor menemukan pelanggaran, ketidakwajaran, atau kelemahan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Pada level pemerintah daerah, temuan audit yang dihasilkan oleh BPK mencerminkan masih adanya masalah dalam pelaksanaan tata kelola, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas pengendalian internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menjalankan kewenangan yang dimilikinya

secara optimal dan akuntabel. Dengan kata lain, temuan audit bukan hanya soal kesalahan teknis, tetapi juga menggambarkan kualitas manajemen dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap publik.

Jika dikaitkan dengan teori agensi, temuan audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk menekan potensi perilaku oportunistik pemerintah daerah sebagai agen. Masyarakat sebagai prinsipal membutuhkan jaminan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan publik. Semakin banyak temuan audit, semakin besar indikasi adanya kesenjangan kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga pengawasan eksternal menjadi sangat penting (Jensen & Meckling, 1976).

Dari sisi kemandirian daerah, banyaknya temuan audit dapat mencerminkan belum matangnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Daerah yang mandiri seharusnya mampu mengelola kewenangan dan sumber dayanya dengan baik serta meminimalkan pelanggaran terhadap aturan. Namun demikian, temuan audit juga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan tata kelola ke depan.

2.1.7 Leverage

Istilah *leverage* lebih banyak dikenal dan digunakan dalam sektor swasta. Secara umum, *leverage* keuangan menggambarkan kemampuan

suatu organisasi dalam memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimilikinya untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya (Widiatmoko & Cahyono, 2025). Kasmir dalam Khoiriyah & Triyonowati (2019), rasio *leverage* digunakan untuk melihat perbandingan antara dana yang berasal dari pemilik dengan dana yang diperoleh dari pihak eksternal seperti kreditur, sehingga dapat diketahui sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan utang.

Dalam konteks sektor publik, khususnya pada pemerintah daerah, konsep *leverage* diadaptasi untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana atau kekayaan bersih pemerintah daerah dengan total utang yang dimiliki. Rasio *leverage* ini digunakan untuk menggambarkan struktur pembiayaan daerah serta tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana pinjaman. Meskipun demikian, rasio *leverage* belum menjadi indikator yang dominan dalam analisis keuangan pemerintah daerah, karena pada umumnya tingkat utang daerah di Indonesia masih relatif rendah (Nurhali, 2024).

Ditinjau dari teori agensi, pemerintah daerah berperan sebagai agen yang diberi mandat oleh masyarakat sebagai *principal* untuk mengelola sumber daya publik, termasuk pengelolaan utang dan pembiayaan daerah. Penggunaan utang yang tercermin dalam rasio *leverage* dapat menimbulkan potensi masalah keagenan apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, tingkat *leverage* yang terkendali dapat menjadi

sinyal bahwa pemerintah daerah mampu menjalankan amanah masyarakat dengan baik serta meminimalkan risiko penyalahgunaan sumber daya publik (Jensen & Meckling, 1976).

Selanjutnya, *leverage* juga memiliki keterkaitan dengan kemandirian daerah, khususnya kemandirian fiskal. Pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung lebih mengandalkan pendapatan asli daerah dibandingkan pembiayaan dari utang. Rendahnya rasio *leverage* dapat mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintahan secara mandiri tanpa ketergantungan yang besar pada pinjaman. Sebaliknya, tingkat *leverage* yang tinggi berpotensi menunjukkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan meningkatnya ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal, yang dalam jangka panjang dapat membebani keuangan daerah (Pratiwi, 2024).

Adapun secara konseptual, rasio *leverage* pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio } \textit{Leverage} = \text{Total Utang} / \text{Total Ekuitas Dana}$$

Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur pembiayaan pemerintah daerah dan tingkat risiko keuangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.8 Kemandirian Fiskal Daerah

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah karena memberikan kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur dan memanfaatkan sumber keuangannya sendiri. Dengan kewenangan tersebut, daerah dituntut mampu mengelola pendapatan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebuah daerah otonom dapat dikatakan mandiri apabila tidak lagi bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri (Ermawati & Aswar, 2020).

Menurut Halim dalam Riyadi (2022), kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik dengan mengandalkan pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Sumber utama pembiayaan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan masyarakat. Pendapatan tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah tanpa ketergantungan penuh pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa kemandirian keuangan daerah terlihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan

mempertanggungjawabkan keuangannya berdasarkan prinsip desentralisasi.

Tujuan utama pengukuran kemandirian keuangan daerah adalah untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara efektif dengan memanfaatkan pendapatannya sendiri. Selain itu, kemandirian keuangan juga dapat digunakan untuk melihat tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal seperti dana transfer pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui rasio kinerja keuangan daerah yang dikenal sebagai rasio kemandirian. Rasio ini menunjukkan tingkat kontribusi masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak maupun retribusi. Penghitungan rasio kemandirian dilakukan dengan membandingkan jumlah PAD dengan pendapatan dari sumber lain seperti dana transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Semakin besar nilai rasio kemandirian, semakin tinggi kemampuan suatu daerah dalam membiayai keuangannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain (Halim dalam Utami, 2018).

Tingkat kemandirian keuangan daerah juga dapat mencerminkan potensi pajak dan kapasitas PAD dalam menutupi belanja publik. Daerah yang tingkat kemandiriannya tinggi biasanya memiliki partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang besar dan mampu mengalokasikan

pendapatan tersebut untuk pembangunan serta layanan publik. Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Fadhiilah & Widiastuty (2023), hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks keuangan dapat digambarkan melalui empat pola utama:

No	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
1.	0 – 25%	Rendah Sekali	Instruktif
2.	25%-50%	Rendah	Konsultatif
3.	50%-75%	Sedang	Partisipatif
4.	75%-100%	Tinggi	Delegatif

Tabel 2. 1 Pola Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Adapun penjelasan mengenai pola rasio kemandirian keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pola instruktif yaitu kondisi ketika pemerintah pusat sangat dominan dan pemerintah daerah mengikuti arahan penuh terkait pengelolaan dan kebijakan keuangan. Kedua, pola konsultatif yaitu ketika pemerintah pusat masih memberikan intervensi namun perannya lebih sebagai pemberi saran kepada daerah. Ketiga, pola partisipatif yaitu keadaan ketika peran pemerintah pusat semakin berkurang dan daerah mulai berperan lebih besar dalam mengelola keuangannya dengan dukungan partisipatif dari pusat. Keempat, pola delegatif yaitu tingkat kemandirian tertinggi di mana pemerintah pusat tidak lagi ikut campur dan pemerintah daerah diberi kepercayaan penuh untuk mengelola kewenangan finansial maupun administrasi secara mandiri.

2.1.9 Luas Daerah

Menurut Sari & Arza (2019), luas daerah merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat besar atau kecilnya kondisi dan kapasitas suatu pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah umumnya diidentifikasi melalui beberapa indikator utama, antara lain besarnya total aset daerah, luas wilayah administratif, serta jumlah penduduk yang dilayani. Indikator-indikator tersebut menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Semakin besar aset, wilayah, dan jumlah penduduk, semakin kompleks pula tanggung jawab dan aktivitas pemerintahan yang harus dikelola (Safitri *et al.*, 2023) .

(Astuti *et al.*, 2022) menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki keunggulan dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya yang relatif lebih memadai, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun aparatur. Kondisi tersebut memberi peluang pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih luas dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, skala pemerintahan yang besar juga berpotensi meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Dalam kemandirian fiskal daerah, luas daerah memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah dengan aset yang besar dan wilayah yang luas umumnya memiliki potensi ekonomi

yang lebih tinggi, sehingga peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga semakin besar.

Namun demikian, besarnya ukuran pemerintah daerah tidak secara otomatis menjamin tercapainya kemandirian fiskal. Pemerintah daerah tetap dituntut memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola aset, merencanakan anggaran, serta menggali potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Tanpa pengelolaan yang optimal, daerah dengan ukuran besar justru berpotensi menghadapi inefisiensi dan ketergantungan fiskal yang tinggi (Mardiasmo, 2018).

2.1.10 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan proses belajar yang memungkinkan peserta didik berperan aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Proses tersebut bertujuan membentuk kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan baik bagi individu maupun masyarakat (Pristiwanti *et al.*, 2022). Melalui pendidikan formal, individu dibekali nilai-nilai dasar yang berperan penting dalam membentuk sikap, terutama dalam merespons dan menerima perubahan atau inovasi baru (Basyit *et al.*, 2020).

Tingkat pendidikan kepala daerah menunjukkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan berpikir yang dimiliki dalam menjalankan

pemerintahan. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya berkaitan dengan kemampuan analisis kebijakan dan pemahaman terhadap tata kelola keuangan publik.

Kemandirian fiskal daerah tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui pendapatan asli daerah tanpa ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Kepala daerah yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung mampu mengelola anggaran secara lebih efektif dan mendorong optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dan keuangan pemerintah (Hasan *et al.*, 2022).

Selain itu, dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah dituntut untuk memahami prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Pendidikan yang memadai dapat membantu kepala daerah dalam menerapkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam konsep keuangan publik daerah (Mardiasmo, 2018). Dengan pengelolaan keuangan yang baik, daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rofiq & Indra, 2021	Variabel Dependen (Y): Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah (X1), Umur Pemerintah Daerah (X2), Status Pemerintah Daerah (X3), Jumlah Penduduk (X4), Jumlah SKPD (X5), Belanja Pegawai (X6), Leverage (X7).	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah justru menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal yang sama juga terlihat pada umur pemerintah daerah, di mana semakin lama usia suatu pemda tidak selalu membuatnya lebih mandiri secara finansial. Sebaliknya, status pemerintah daerah dan jumlah penduduk terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan. Namun, jumlah SKPD yang terlalu banyak justru berdampak negatif. Selain itu, tingginya belanja pegawai juga menurunkan kemandirian keuangan daerah. Berbeda dengan variabel lainnya, leverage menunjukkan pengaruh positif.
2.	Ridho, 2021	Variabel Dependen (Y): Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

		Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), Ukuran Legislatif (X3), Karakteristik Kepala Daerah (X4).	daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3.	Putri & Priyadi, 2021	Variabel Dependen (Y): Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Independen: <i>Leverage</i> (X1), Dana Perimbangan (X2), Belanja Modal (X3).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	Adinata & Efendi, 2022	Variabel Dependen (Y): Kinerja Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> dan ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara

		Pemerintah Daerah Jawa Timur . Variabel Independen: <i>Leverage</i> (X1), Ukuran Pemerintah Daerah (X2), Dana Perimbangan (X3).	itu, dana perimbangan justru berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5.	Khasanah, 2023	Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Variabel Independen: Jumlah Anggota DPRD (X1), Jumlah Anggaran Belanja Daerah (X2), Bimbingan Teknis (X3), Pendidikan Kepala Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan teknis berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, jumlah anggota DPRD, jumlah anggaran belanja daerah, pendidikan kepala daerah, dan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

		(X4), Umur Pemerintah Daerah (X5).	
6.	Putri, 2023	Variabel Dependen (Y): Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah (X1), Jumlah Penduduk (X2), Umur Pemerintah Daerah (X3), Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X4).	Hasil penelitian menunjukkan temuan bahwa ukuran pemerintah daerah dan tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah. Sebaliknya, umur pemerintah daerah dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah.
7.	Sunandar, 2023	Variabel Dependen (Y): Kinerja Keuangan Daerah Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi (X1), Ukuran Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, tingkat pendidikan kepala daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

		Daerah (X2), Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X3), Umur Pemerintah Daerah (X4).	
8.	Sabono & Firmansyah, 2024	Variabel Dependen (Y): Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Variabel Independen: Infrastruktur (X1), Ukuran Pemerintah Daerah (X2).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial infrastruktur sektor pariwisata dan budaya terhadap kemandirian daerah mempunyai pengaruh negatif, begitu juga dengan ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian daerah mempunyai pengaruh negatif. Sedangkan infrastruktur sektor perumahan dan fasilitas umum memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian daerah.
9.	Perangin-Angin, 2024	Variabel Dependen (Y): Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, belanja pegawai terbukti berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa

		Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), Belanja Pegawai (X3), dan Jumlah Penduduk (X4).	pengelolaan belanja pegawai yang baik dapat mendukung kinerja keuangan daerah. Sementara itu, jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
10.	Humaira & Widyawati, 2025	Variabel Dependen (Y): Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), dan Jumlah Penduduk (X3).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Sesuai perspektif isomorfisme koersif, semakin besar jumlah penduduk suatu daerah maka semakin besar pula tekanan yang diterima pemerintah daerah. Tekanan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan program pembangunan sumber daya manusia. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan kualitas penduduk, daya beli masyarakat juga cenderung meningkat. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah. Pada akhirnya, pertumbuhan populasi yang diiringi dengan kebijakan yang sesuai dapat memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat.

Pertambahan jumlah penduduk akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat di daerah tersebut. Daya beli yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian keuangan daerah. Selain itu, semakin besar populasi suatu wilayah, semakin besar pula permintaan terhadap layanan pemerintah dan semakin banyak aktivitas ekonomi yang berlangsung, yang akhirnya memberikan keuntungan bagi berbagai pihak.

Menurut penelitian Rofiq & Indra (2021), jumlah penduduk terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan. Temuan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Humaira & Widyawati, 2025) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah.

2.3.2 Pengaruh Indeks E-Government Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Dalam perspektif isomorfisme mimetik, penerapan *e-government* seringkali dilakukan karena pemerintah daerah meniru praktik daerah lain yang dinilai berhasil dan memiliki kinerja keuangan yang baik. Peniruan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan legitimasi di mata publik.

Penerapan *e-government* dipandang sebagai solusi yang relatif aman karena telah terbukti berhasil di daerah lain. *E-government* memudahkan penyampaian informasi publik dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Transparansi tersebut dapat mendorong kepercayaan masyarakat dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Kepercayaan publik yang meningkat berpotensi mendorong partisipasi ekonomi

masyarakat dan berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Semakin optimal penerapan *e-government*, semakin efektif pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Dengan demikian, implementasi *e-government* yang lebih matang berpotensi memperkuat kemandirian keuangan daerah, karena pengelolaan PAD dan belanja daerah menjadi lebih sistematis dan mudah dipantau. Namun, penelitian (Humaira & Widyawati, 2025) menyatakan bahwa Indeks SPBE (*e-government*) tidak memiliki hubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penentu kemandirian daerah. Hal ini disebabkan oleh tingkat kematangan SPBE yang masih berada pada kategori cukup, sehingga implementasinya belum berjalan optimal. Penelitian (Avianto & Amelia, 2021) juga menunjukkan bahwa kendala utama *e-government* meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya pemahaman pengguna, serta dukungan pendanaan yang belum memadai. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Indeks *e-government* berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah.

2.3.3 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dilaksanakan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wilayah otonom. Menurut Setyaningrum & Syafitri (2012) umur administratif suatu pemerintah daerah merujuk pada jumlah tahun sejak daerah tersebut resmi dibentuk sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

Berdasarkan teori institusional, umur pemerintah daerah merujuk pada tekanan normatif dari aturan, standar, dan tuntutan publik yang dapat memengaruhi kinerjanya. Pemerintah daerah yang telah berdiri lebih lama umumnya memiliki pengalaman dan kapasitas organisasi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut membuat pemerintah daerah lebih mampu menyesuaikan kebijakan fiskal secara mandiri. Pada akhirnya, kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah pada periode selanjutnya.

Semakin lama umur suatu pemerintah daerah, semakin berpengalaman dalam mengelola administrasi, anggaran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Putri, 2023; Sunandar,

2023; Khasanah 2023 menunjukkan bahwa umur suatu pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangannya. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Alfi & Sari (2023) yang menyimpulkan bahwa umur pemerintah daerah justru berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya ketidakkonsistenan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah.

2.3.4 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan teori agensi, pemerintah daerah berperan sebagai pihak yang dipercaya masyarakat untuk mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab. Munculnya temuan audit yang tinggi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kepentingan masyarakat dan tindakan pemerintah daerah yang mencerminkan lemahnya pengendalian serta pengawasan. Kondisi ini dapat menurunkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian fiskal.

Temuan audit BPK adalah permasalahan yang berhasil diidentifikasi BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat dari adanya pelanggaran terhadap sistem pengendalian internal maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyaknya temuan audit menunjukkan

bahwa semakin besar tingkat pelanggaran yang terjadi, sehingga mencerminkan kualitas kinerja pemerintah daerah yang kurang baik. Dengan kata lain, semakin tinggi jumlah temuan audit, maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Alkhasani & Murtanto (2024) juga mendukung hal tersebut, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah.

2.3.5 Pengaruh Leverage Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Leverage pada dasarnya menunjukkan perbandingan antara total utang dengan modal yang dimiliki suatu entitas. Dengan kata lain, *leverage* menggambarkan seberapa besar aktivitas operasional dibiayai dengan utang dibandingkan dengan ekuitas. Jika nilai *leverage* semakin tinggi, artinya porsi pembiayaan melalui utang juga semakin besar. Dalam konteks keuangan pemerintah daerah, kondisi tersebut menandakan bahwa daerah semakin bergantung pada sumber pendanaan eksternal untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Ketergantungan pembiayaan dari luar ini dapat menurunkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri.

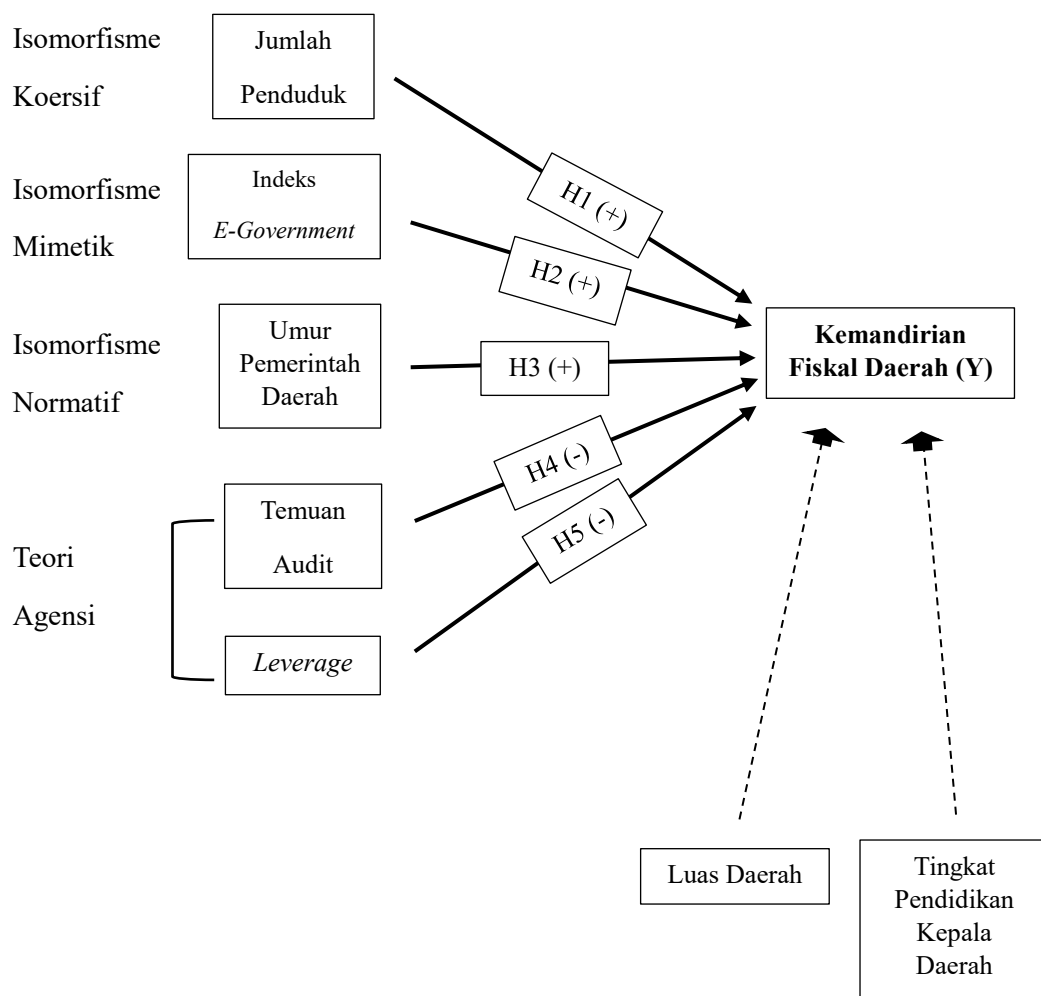
Dalam teori agensi, kondisi ini dapat menimbulkan masalah karena pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi kepercayaan masyarakat bisa mengambil keputusan pembiayaan yang kurang sesuai dengan kepentingan publik. Tingginya utang membuat sebagian pendapatan daerah harus digunakan untuk membayar kewajiban tersebut, sehingga dana yang bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah secara mandiri menjadi terbatas. Akibatnya, semakin tinggi leverage, semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah.

Oleh sebab itu, *leverage* yang tinggi cenderung berkorelasi dengan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan *leverage* yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih mampu mengelola pendanaannya tanpa ketergantungan berlebihan terhadap pihak eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Priyadi (2021) menunjukkan bahwa variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Berbeda dengan hasil yang ditemukan Rofiq & Indra (2021), jika *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya ketidakkonsistenan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H5: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan hipotesis penelitian yang telah penulis uraikan di atas, kerangka penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel dan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian pada Gambar 2.2 maka dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki 5 hipotesis. Hipotesis pertama (H1) yaitu jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Hipotesis kedua (H2) yaitu indeks *e-government* berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Selanjutnya, hipotesis ketiga (H3) yaitu umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Hipotesis keempat (H4) yaitu temuan audit berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Terakhir, hipotesis kelima (H5) yaitu *leverage* berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Dalam penelitian ini juga digunakan variabel kontrol berupa luas daerah dan tingkat pendidikan kepala daerah untuk melihat konsistensi pengaruh variabel independen terhadap kemandirian fiskal daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2024. Variabel dependen yang digunakan adalah kemandirian fiskal daerah. Variabel independen yang digunakan adalah jumlah penduduk, indeks *e-government*, umur pemerintah daerah, temuan audit dan *leverage*. Variabel kontrol yang digunakan adalah luas daerah dan tingkat pendidikan kepala daerah.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Menurut (Susanto *et al.*, 2024), populasi merupakan seluruh objek yang menjadi fokus utama dan sasaran dalam suatu penelitian. Populasi tidak hanya mencakup jumlah objek yang diteliti, tetapi juga seluruh karakteristik dan sifat yang melekat pada objek tersebut. Populasi inilah

yang kemudian dianalisis oleh peneliti untuk dipahami lebih jauh dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024. Tahun 2024 dipilih sebagai periode penelitian karena bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, sehingga menjadi periode yang tepat untuk mengamati dinamika kebijakan dan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan kemandirian fiskal. Selain itu, tahun 2024 juga menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia yang kuat dan stabil, tercermin dari pertumbuhan PDB sebesar 5,1% yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,0% (Kemenkeu, 2025a). Berdasarkan data terbaru Kementerian Dalam Negeri Indonesia tahun 2024, jumlah pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota sehingga total populasi mencapai 514 kabupaten/kota.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang bisa mewakili keseluruhan sehingga dapat memberikan gambaran umum (Riyantono & Hatmawan, 2020). Sejalan dengan itu, sampel juga dapat diartikan sebagai sebagian dari populasi yang ditentukan melalui prosedur tertentu sehingga diharapkan mampu mewakili keseluruhan populasi (Mulyana *et al.*, 2024).

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Teknik

ini memilih subjek berdasarkan ciri dan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan sesuai tujuan penelitian (Memon *et al.*, 2025). Adapun kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2024.
2. Pemerintah daerah yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian, yaitu jumlah penduduk, indeks *e-government*, umur pemerintah daerah, temuan audit, *leverage*, serta kemandirian fiskal daerah.

3.3 Deskripsi Objek Penelitian

Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini tergolong besar, peneliti tidak menggunakan seluruh populasi sebagai objek penelitian. Sampel dipilih dengan kriteria tertentu agar penelitian dapat dilakukan secara lebih efisien. Dengan adanya pembatasan tersebut, ruang lingkup penelitian menjadi lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan rumus Taro Yamane. Rumus Taro Yamane merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel dalam suatu penelitian. Rumus ini membantu peneliti dalam menetapkan ukuran sampel dari populasi yang besar sehingga dapat meminimalkan bias dalam penelitian. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Taro Yamane pada tahun 1967 dan hingga saat ini masih banyak digunakan sebagai acuan dalam menentukan

jumlah sampel penelitian (Imansari, 2023). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 514, yang merupakan total pemerintah daerah di Indonesia. Adapun rumus Taro Yamane yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

$$n = \frac{514}{514(0,1)^2 + 1}$$

$$n = 83,71 = 84 \text{ sampel}$$

Keterangan:

n= Ukuran sampel minimum yang diperlukan dalam penelitian

N= Jumlah seluruh populasi

d= Tingkat kesalahan atau batas toleransi kesalahan yang diperkenankan sebesar 10%

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Menurut Sujarweni (2019), variabel dependen atau variabel terikat adalah:

“Variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas, sehingga berperan sebagai hasil atau akibat dari perubahan variabel independen”.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemandirian Fiskal Daerah (Y). Kemandirian fiskal daerah pada dasarnya

menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan dan kegiatan pemerintahannya dengan pendapatan daerah sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pihak eksternal (Suryantini *et al.*, 2017). Semakin tinggi rasio kemandirian daerah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal, terutama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi semakin rendah dan begitupun sebaliknya (Faud, 2016). Menurut Mahmudi (2019), rasio ini dihitung dengan cara membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah. Rumus rasio kemandirian daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

Pendekatan ini telah digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Bandung (Fatma & Ismanto, 2024).

3.4.2 Variabel Independen

Menurut Sujarweni (2019), variabel independen atau variabel bebas adalah:

“Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen (X) yaitu jumlah penduduk, indeks *e-government*, umur pemerintah daerah, temuan audit, dan *leverage*. Adapun penjelasan mengenai variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk

Menurut Rahman (2023), penduduk merupakan sejumlah orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut terbentuk melalui proses demografi seperti kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar potensi pemasukan daerah melalui pajak dan retribusi, sehingga bisa berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah.

Indeks *E-Government*

Indeks E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan digitalisasi pemerintahan di daerah. Pengukuran ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan berkualitas dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan SPBE juga berperan dalam meminimalkan risiko moral hazard dan adverse selection dalam hubungan prinsipal–agen, karena digitalisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan (Anggono & Haryanto, 2024). Indeks SPBE menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah telah mengadopsi teknologi informasi dalam menjalankan fungsi administrasi dan memberikan layanan kepada

masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi nilai Indeks SPBE suatu daerah, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kapasitas pembangunan daerah.

Umur Pemerintah Daerah

Umur pemerintah daerah merupakan jangka waktu berdirinya suatu pemerintah daerah sejak ditetapkan secara yuridis sebagai entitas pemerintahan (Putri, 2023). Semakin tinggi umur pemerintah daerah, diasumsikan semakin besar pengalaman, kematangan organisasi, serta kemampuan birokrasi dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik. Rumus pengukuran umur pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

$\text{Umur Pemda} = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Berdiri Pemerintah Daerah}$
--

Temuan Audit

Audit adalah kegiatan mengumpulkan dan menilai bukti mengenai suatu informasi guna mengetahui serta melaporkan sejauh mana informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (Arens sebagaimana dikutip Junus *et al.*, 2022). Dalam ranah keuangan negara, pelaksanaan audit mengikuti ketentuan UU No. 15 Tahun 2004 dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas melakukan pemeriksaan yang independen, objektif, dan profesional serta menghasilkan opini, temuan, kesimpulan, atau rekomendasi. Temuan audit BPK sendiri menggambarkan adanya

pelanggaran terhadap sistem pengendalian internal maupun peraturan perundang-undangan dan semakin banyak temuan tersebut menunjukkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya (Wana & Juniartika, 2021).

Leverage

Leverage menggambarkan seberapa besar suatu daerah membiayai asetnya dengan menggunakan utang dibandingkan modal atau pendapatan sendiri. Artinya, semakin tinggi porsi pembiayaan dari utang, semakin besar ketergantungan daerah terhadap pihak luar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan (Kasmir dalam Khotimah *et al.*, 2020). Selain itu, *leverage* juga dapat dipahami sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap seperti pinjaman atau kewajiban pembayaran lainnya dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan pendapatan daerah. Namun, semakin besar beban dana tetap tersebut, semakin besar pula risiko ketergantungan fiskal yang dapat memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah (Wang *et al.*, 2023).

Rumus pengukuran *leverage* adalah sebagai berikut:

$\text{Leverage} = \text{Total Utang} / \text{Total Ekuitas}$

3.4.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan dalam penelitian agar hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dianalisis secara lebih akurat tanpa dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian (Arib *et al.*, 2024). Adapun variabel kontrol dalam penelitian ini adalah luas daerah dan tingkat pendidikan kepala daerah. Luas daerah menggambarkan besar kecilnya kapasitas suatu pemerintah daerah berdasarkan total aset yang dimiliki. Semakin besar total aset yang dimiliki, semakin besar pula ukuran suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan skala yang lebih besar biasanya dituntut untuk menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dan mendetail. Di samping itu, semakin luas perhatian publik dan semakin kompleks pengelolaan keuangannya, semakin meningkat pula tekanan serta pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (Wardani & Ariani, 2022). Rumus pengukuran luas daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Luas Daerah (LD)} = \text{Total Aset}$$

Sementara itu, tingkat pendidikan kepala daerah menunjukkan jenjang pendidikan formal tertinggi yang pernah diselesaikan oleh kepala daerah. Kepala daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengelola pemerintahan daerah.

Kemampuan tersebut berperan penting dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah yang lebih efektif, termasuk upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan kepala daerah diukur menggunakan skala ordinal. Skala ordinal digunakan karena tingkat pendidikan memiliki urutan atau tingkatan yang jelas, mulai dari pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Penggunaan skala ini membantu peneliti untuk membedakan tingkat pendidikan kepala daerah berdasarkan jenjangnya tanpa memperhitungkan jarak numerik antar kategori (*Santi et al.*, 2024). Variabel ini diukur berdasarkan kriteria tertentu yang disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

No	Indikator	Poin
1	SMA	1
2	Diploma (D3/D4)	2
3	Strata -1	3
4	Strata -2 +	4

Tabel 3. 1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data penelitian yang telah dikumpulkan (Ghozali, 2018). Melalui teknik ini, peneliti dapat melihat karakteristik dasar dari setiap variabel, seperti nilai rata-rata (mean), nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (maksimum), serta seberapa besar variasi data yang ditunjukkan melalui standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut (Ghozali, 2018), uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Tujuan dari uji ini adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria konsistensi, estimasi yang tepat, serta bebas dari unsur bias. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara lebih akurat dan dapat dipercaya.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan apakah data dalam model regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode statistik non-parametrik Kolmogorov–Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan pada nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar

dari 0,05 ($\geq 0,05$), maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($< 0,05$), maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel independen dalam model regresi terjadi hubungan yang kuat atau saling mempengaruhi satu sama lain (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah ketika tidak terdapat multikolinearitas pada variabel independennya. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi. Berdasarkan Ghozali (2018), jika nilai VIF berada di bawah angka 10 dan nilai tolerance $> 0,10$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians pada nilai residual antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Jika varians residual dari setiap pengamatan bernilai sama, maka kondisi tersebut disebut homokedastisitas. Sebaliknya, apabila varians residual menunjukkan perbedaan, berarti terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas atau bersifat homokedastisitas. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan uji Glejser melalui software SPSS. Pada uji Glejser, nilai absolut residual diregresikan terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi parameter beta lebih besar dari 0,05 ($> 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018), analisis regresi merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Tujuannya adalah untuk menghasilkan estimasi atau prediksi nilai rata-rata (mean) variabel dependen berdasarkan variabel independennya. Regresi linear berganda bermanfaat untuk mengukur dan memprediksi seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun bentuk persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + B_6LD + b_7TPKD + e$$

Keterangan:

Y = Kemandirian Fiskal Daerah

a = Nilai konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7$ = Koefisien regresi

X_1	= Jumlah penduduk
X_2	= Indeks <i>e-government</i>
X_3	= Umur pemerintah daerah
X_4	= Temuan audit
X_5	= <i>Leverage</i>
LD	= Luas Daerah
TPKD	= Tingkat Pendidikan Kepala Daerah
e	= Standar error

3.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen (Widarjono, 2018). Nilai R^2 berada pada rentang 0 sampai 1. Apabila nilai R^2 mendekati 0, maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen dalam porsi yang kecil. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 1, maka model regresi yang digunakan dinilai memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan informasi terkait variabel dependen secara keseluruhan.

3.5.5 Uji Parsial (Uji T)

Uji T atau uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah (Ghozali, 2018). Suatu variabel independen dikatakan memiliki pengaruh signifikan apabila nilai signifikansi yang dihasilkan berada di bawah 0,05. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi di atas 0,05, maka variabel independen tersebut dianggap tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

BAB IV

ANALISIS DATA & PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data dan pembahasan terkait pengujian hipotesis dalam penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini pada awalnya berjumlah 200 daerah yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Namun, sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat dalam analisis statistik.

Berdasarkan hasil pengujian awal, diketahui bahwa data penelitian belum memenuhi asumsi normalitas sehingga diperlukan langkah penanganan terhadap data yang terindikasi sebagai *outlier*. *Outlier* merupakan observasi yang memiliki karakteristik sangat berbeda dari sebagian besar data lainnya sehingga dapat mempengaruhi hasil estimasi model regresi dan menyebabkan bias dalam interpretasi hasil penelitian.

Untuk mengidentifikasi data yang termasuk dalam kategori outlier, penelitian ini menggunakan *Mahalanobis Distance* dan *Cook's Distance*. *Mahalanobis Distance* digunakan untuk mendeteksi *outlier multivariat*, yaitu observasi yang memiliki jarak yang sangat jauh dari pusat distribusi data berdasarkan kombinasi beberapa variabel sekaligus. Nilai *Mahalanobis Distance* kemudian dibandingkan dengan nilai *Chi-Square* pada tingkat signifikansi tertentu dengan derajat kebebasan sebesar jumlah variabel independen dalam model

penelitian. Apabila nilai *Mahalanobis Distance* suatu observasi lebih besar dari nilai *Chi-Square*, maka observasi tersebut diindikasikan sebagai outlier multivariat sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari dataset penelitian.

Selain menggunakan *Mahalanobis Distance*, penelitian ini juga menggunakan *Cook's Distance* untuk mengidentifikasi observasi yang memiliki pengaruh besar terhadap model regresi. *Cook's Distance* digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan estimasi koefisien regresi apabila suatu observasi dihapus dari model. Adapun perbandingan hasil uji data sebelum dan sesudah proses penghapusan outlier disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Perbandingan Hasil Uji Data

No	Uji Asumsi Klasik	Kriteria	n = 200	n = 187
1.	Uji Normalitas	Sig > 0,05	.000	.200 ^{c,d}
2.	Uji Multikolinearitas	VIF < 10 Tolerance > 0,10	Tidak terjadi Multikolinearitas	
3.	Uji Heteroskedastisitas	Sig > 0,05	.975	.057
			.000	.495
			.957	.068
			.003	.297
			.386	.775
			.495	.090
			.301	.577

Tabel 4. 1 Perbandingan Hasil Uji Data Sebelum dan Setelah Penghapusan Outlier

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Hasil uji asumsi klasik pada data awal yang terdiri dari 200 daerah menunjukkan bahwa data belum berdistribusi normal dan masih terdapat dua variabel yang mengalami heteroskedastisitas, sedangkan uji multikolinearitas menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Setelah dilakukan penghapusan outlier menjadi 187 daerah, hasil pengujian menunjukkan bahwa data telah memenuhi uji asumsi klasik, dimana nilai signifikansi uji normalitas berada di atas 0,05 dan tidak ditemukan indikasi multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

4.1 Analisis Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang terdiri dari variabel independen, variabel kontrol, dan variabel dependen. Variabel independen meliputi jumlah penduduk, indeks *e-government*, umur pemerintah daerah, temuan audit, dan *leverage*. Sementara itu, luas daerah dan tingkat pendidikan kepala daerah digunakan sebagai variabel kontrol. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian fiskal daerah. Hasil analisis statistik deskriptif dari seluruh variabel penelitian disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Penduduk (X1)	187	10	15	12.96	.966
Indeks <i>E-Government</i> (X2)	187	1.44	4.77	3.2160	.66466

Umur Pemerintah Daerah (X3)	187	2	4	3.82	.599
Jumlah Audit (X4)	187	4	46	19.09	8.241
<i>Leverage</i> (X5)	187	0.00	.24	.0250	.03310
Luas Daerah (X6)	187	26	31	28.83	.654
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X7)	187	1	4	3.72	.654
Kemandirian Fiskal Daerah (Y)	187	-3.91	-.78	-2.1370	.62878

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Hasil dari analisis uji statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Jumlah Penduduk

Dalam uji ini, variabel jumlah penduduk diubah menjadi bentuk logaritma natural. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui variabel jumlah penduduk memiliki nilai minimum 10 dan nilai maksimum 15, serta nilai rata-rata sebesar 12,96 dan standar deviasi sebesar 0,966.

b) Indeks *E-Government*

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui variabel indeks *e-government* memiliki nilai minimum 1,44 dan nilai maksimum 4,77, serta nilai rata-rata 3,2160 dan standar deviasi sebesar 0,66466.

c) Umur Pemerintah Daerah

Dalam uji ini, variabel umur pemerintah daerah diubah menjadi bentuk logaritma natural. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui variabel umur pemerintah daerah memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 4, serta nilai rata-rata sebesar 3,82 dan standar deviasi sebesar 0,599.

d) Temuan Audit

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui variabel temuan audit memiliki nilai minimum 4 dan nilai maksimum 46, serta nilai rata-rata 19,09 dan standar deviasi sebesar 8,241.

e) *Leverage*

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui variabel *leverage* memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 0,24, serta nilai rata-rata 0,0250 dan standar deviasi sebesar 0,03310.

f) Luas Daerah

Dalam uji ini, variabel luas daerah diubah menjadi bentuk logaritma natural. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui variabel luas daerah memiliki nilai minimum 26 dan nilai maksimum 31, serta nilai rata-rata 28,83 dan standar deviasi sebesar 0,654.

g) Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Dalam uji ini, tingkat pendidikan kepala daerah menggunakan skala ordinal 1 hingga 4. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui variabel tingkat pendidikan kepala daerah memiliki nilai minimum 1 dan

nilai maksimum sebesar 4, serta nilai rata-rata sebesar 3,72 dan standar deviasi sebesar 0,654.

h) Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam uji ini, kemandirian fiskal daerah diubah menjadi bentuk logaritma natural. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui variabel kemandirian fiskal daerah memiliki nilai minimum -3,91 dan nilai maksimum -0,78, serta nilai rata-rata sebesar -2,1370 dan standar deviasi sebesar 0,62878.

4.2 Analisis Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memenuhi persyaratan analisis regresi. Pengujian ini bertujuan agar data yang dianalisis bersifat valid, tidak bias, dan konsisten sehingga hasil estimasi koefisien regresi dapat diinterpretasikan secara tepat. Selain itu, melalui uji ini dapat diketahui apakah data berdistribusi normal serta terbebas dari masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan dalam pengujian ini adalah Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05, maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3**Hasil Uji Normalitas**

		Residual Tidak Terstandarisasi
n		187
Parameter Normal ^{a,b}	Rata-rata	.0000000
	Std. Deviasi	.41034556
Perbedaan Paling Ekstrem	Absolut	.053
	Positif	.053
	Negatif	-.039
Uji Statistik		.053
Signifikansi Asimtotik (2 sisi)		.200 ^{c,d}

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Dari tabel di atas diketahui bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 atau nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai yang dihasilkan dari uji normalitas lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah terdistribusi secara normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Pengujian pada uji multikolinearitas memperhatikan pada besarnya nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Syarat tidak terjadinya multikolinearitas jika tolerance value > 0,10 dan nilai dari VIF < 10 maka dapat disimpulkan

bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Jumlah Penduduk	.371	2.698	Tidak terjadi Multikolinearitas
Indeks <i>E-Government</i>	.592	1.688	Tidak terjadi Multikolinearitas
Umur Pemerintah Daerah	.585	1.711	Tidak terjadi Multikolinearitas
Temuan Audit	.968	1.033	Tidak terjadi Multikolinearitas
<i>Leverage</i>	.953	1.049	Tidak terjadi Multikolinearitas
Luas Daerah	.657	1.523	Tidak terjadi Multikolinearitas
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	.968	1.033	Tidak terjadi Multikolinearitas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai *tolerance* menunjukkan nilai $> 0,10$ dengan hasil nilai *Tolerance* dari Jumlah Penduduk sebesar 0,371; nilai *Tolerance* dari Indeks *E-Government* sebesar 0,592; nilai *Tolerance* dari Umur Pemerintah Daerah sebesar 0,585; nilai *Tolerance* dari Temuan Audit sebesar 0,968; nilai *Tolerance* dari *Leverage* sebesar 0,953; nilai *Tolerance* dari Luas Daerah sebesar 0,657; nilai *Tolerance* dari Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Pendidikan Kepala Daerah sebesar 0,968. Nilai VIF pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dari $VIF < 10$ dengan nilai VIF dari Jumlah Penduduk sebesar 2,698; nilai VIF dari Indeks E-Government sebesar 1,688; nilai VIF dari Umur Pemerintah Daerah sebesar 1,711; nilai VIF dari Temuan Audit sebesar 1,033; nilai VIF dari Leverage sebesar 1,049; nilai VIF dari Luas Daerah sebesar 1,523; nilai VIF dari Tingkat Pendidikan Kepala Daerah sebesar 1.033. Dari penjelasan nilai Tolerance dan nilai VIF tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

4.2.3 Analisis Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji pada sebuah model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila metode glejser pada uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi menunjukkan $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas dengan metode glejser pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Sig.
Jumlah Penduduk (X1)	.057
Indeks <i>E-Government</i> (X2)	.495
Umur Pemerintah Daerah (X3)	.068
Jumlah Audit (X4)	.297
<i>Leverage</i> (X5)	.775
Luas Daerah (X6)	.090
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X7)	.577

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Syarat tidak terjadi heteroskedastisitas pada metode *glejser* adalah tingkat signifikansi $> 0,05$. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari Jumlah Penduduk sebesar 0,057; nilai signifikansi dari Indeks *E-Government* sebesar 0,495; nilai signifikansi dari Umur Pemerintah Daerah sebesar 0,068; nilai signifikansi dari Temuan Audit sebesar 0,297; nilai signifikansi dari *Leverage* sebesar 0,775; nilai signifikansi dari Luas Daerah sebesar 0,090; nilai signifikansi dari Tingkat Pendidikan sebesar 0,577. Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas dengan metode *glejser* menunjukkan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.3 Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, indeks *e-government*, umur pemerintah daerah, temuan audit, *leverage*, serta variabel kontrol luas daerah dan tingkat pendidikan kepala daerah terhadap kemandirian fiskal daerah. Hasil dari analisis regresi linier berganda pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6

Hasil Analisis Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-9.116	1.478	-6.167	.000
Jumlah Penduduk (X1)	.193	.052	3.695	.000
Indeks <i>E-Government</i> (X2)	.311	.060	5.183	.000
Umur Pemerintah Daerah (X3)	.201	.067	2.994	.003
Temuan Audit (X4)	-.008	.004	-2.160	.032
<i>Leverage</i> (X5)	2.192	.949	2.310	.022
Luas Daerah (X6)	.106	.058	1.823	.070
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X7)	-.061	.048	-1.275	.204

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Model persamaan berdasarkan hasil analisis uji regresi linier berganda pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

$$Y = -9.116 + 0,193X_1 + 0,311X_2 + 0,201X_3 - 0,008X_4 + 2,192X_5 + 0,106X_6 - 0,061X_7 + e$$

Berikut interpretasi persamaan regresi linear berganda di atas:

1. Pada persamaan diperoleh nilai konstanta sebesar -9,116 yang berarti variabel kemandirian fiskal daerah hasilnya konstan tanpa dipengaruhi variabel independen lainnya sebesar -9,116.
2. Koefisien variabel jumlah penduduk adalah sebesar 0,193 yang berarti ketika jumlah penduduk meningkat maka kemandirian fiskal daerah meningkat sebesar 0,193.
3. Koefisien indeks *e-government* adalah sebesar 0,311 yang berarti ketika indeks e-government meningkat maka kemandirian fiskal daerah meningkat sebesar 0,311.
4. Koefisien variabel umur pemerintah daerah adalah sebesar 0,201 yang berarti ketika umur pemerintah daerah meningkat maka kemandirian fiskal daerah meningkat sebesar 0,201.
5. Koefisien variabel temuan audit adalah sebesar -0,008 yang berarti ketika temuan audit meningkat maka kemandirian fiskal daerah menurun sebesar 0,008.

6. Koefisien variabel *leverage* adalah sebesar 2,192 yang berarti ketika leverage meningkat maka kemandirian fiskal daerah meningkat sebesar 2,192.
7. Koefisien variabel luas daerah adalah sebesar 0,106 yang berarti ketika luas daerah meningkat maka kemandirian fiskal daerah meningkat sebesar 0,106.
8. Koefisien variabel tingkat pendidikan kepala daerah adalah sebesar -0,061 yang berarti ketika tingkat pendidikan kepala daerah meningkat maka kemandirian fiskal daerah menurun sebesar -0,061.

4.4 Analisis Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model yang ada dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji dari uji R^2 dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.574	.557	.41829

Tabel 4. 7 Hasil Uji R^2

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Dari hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 4.7, diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,557 atau sebesar 55,7% yang artinya bahwa kemandirian fiskal daerah di Indonesia dapat dijelaskan sebesar 55,7% oleh variabel-variabel

independen yaitu jumlah penduduk, indeks *e-government*, umur pemerintah daerah, temuan audit, dan *leverage*, sedangkan 44,3% variasi kemandirian fiskal daerah dijelaskan oleh variabel lainnya diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.5 Analisis Uji Hipotesis

4.5.1 Uji T

Perhitungan uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh sebuah variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil dari uji T dilihat dari nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi dari variabel independen $\leq 0,05$ maka hipotesis penelitian menunjukkan pengaruh signifikan yaitu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya. Hasil dari uji t pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8

Hasil Uji T

Variabel	Koefisien	T	Sig
(Constant)	-9.116	-6.167	.000
Jumlah Penduduk (X1)	.193	3.695	.000
Indeks <i>E-Government</i> (X2)	.311	5.183	.000
Umur Pemerintah Daerah (X3)	.201	2.994	.003
Temuan Audit (X4)	-.008	-2.160	.032
<i>Leverage</i> (X5)	2.192	2.310	.022
Luas Daerah (X6)	.106	1.823	.070

Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X7)	-.061	-1.275	.204
---------------------------------------	-------	--------	------

Tabel 4. 8 Hasil Uji T

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Tabel 4.8 menunjukkan hasil dari uji T sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hipotesis-hipotesis penelitian.

a) Jumlah Penduduk

Hasil uji menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,193, nilai t hitung sebesar 3,695, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil dari tabel menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah (Y).

b) Indeks *E-Government*

Hasil uji menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,311, nilai t hitung sebesar 5,183 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil dari nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indeks E-Government (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah (Y)

c) Umur Pemerintah Daerah

Hasil uji regresi berganda menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,201, nilai t hitung sebesar 2,994, dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil

dari nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Umur Pemerintah Daerah (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah (Y)

d) Temuan Audit

Hasil uji menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,008, nilai t hitung sebesar -2,160, dan nilai signifikansi sebesar 0,032. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil dari tabel menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,03 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Temuan Audit (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah (Y).

e) *Leverage*

Hasil uji menghasilkan nilai koefisien sebesar 2,192, nilai t hitung sebesar 2,310, dan nilai signifikansi sebesar 0,022. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil dari tabel menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Leverage (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah (Y).

f) Luas Daerah

Hasil uji menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,106, nilai t hitung sebesar 1,823, dan nilai signifikansi sebesar 0,070. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil dari tabel menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,070 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Luas Daerah (X6) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah (Y).

g) Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Hasil uji menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,061, nilai t hitung sebesar -1,275, dan nilai signifikansi sebesar 0,204. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil dari tabel menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,204 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X7) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah (Y).

4.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Hasil dari uji regresi mengenai kemandirian fiskal daerah yang dipengaruhi oleh beberapa variabel independen, yaitu : Jumlah Penduduk (H1), Indeks *E-Government* (H2), Umur Pemerintah Daerah (H3), Temuan Audit (H4), Leverage (H5) menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis diterima sehingga jumlah penduduk, indeks *e-government*, umur pemerintah daerah, temuan audit, dan *leverage* berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. Pembahasan dari hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

4.6.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel jumlah penduduk menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,193 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga temuan ini bermakna bahwa hipotesis pertama (H1)

yang menyatakan “Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah” dinyatakan **DIDUKUNG**.

Jumlah penduduk yang besar dalam suatu daerah biasanya diikuti oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks keuangan daerah, jumlah penduduk dapat mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang lebih besar umumnya memiliki aktivitas ekonomi yang lebih tinggi sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah, terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan penerimaan tersebut dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, jumlah penduduk dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka semakin besar pula potensi penerimaan daerah yang dapat diperoleh

pemerintah daerah melalui berbagai sumber pendapatan asli daerah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri.

Apabila dikaitkan dengan teori institusional, pemerintah daerah dapat mengalami tekanan dari masyarakat sebagai pihak eksternal yang mengharapkan adanya pelayanan publik yang lebih baik serta pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Tekanan tersebut dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, termasuk dalam upaya menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka tingkat kemandirian fiskal daerah juga akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rofiq & Indra (2021) yang menemukan temuan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.6.2 Pengaruh Indeks E-Government terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel indeks *e-government* menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,311 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga temuan ini bermakna bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan “Indeks E-Government berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah” dinyatakan **DIDUKUNG**.

Indeks *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik secara digital. Penerapan SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi indeks SPBE suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerapan SPBE dapat mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah. Pemanfaatan sistem digital dalam administrasi pemerintahan membantu pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerah secara lebih efektif, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta mempermudah proses pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan transparan, potensi pendapatan asli daerah dapat digali secara lebih optimal sehingga mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa indeks *e-government* berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di suatu daerah, maka semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan

serta mengoptimalkan penerimaan daerah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran daerah tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Apabila dikaitkan dengan teori institusional, pengaruh SPBE terhadap kemandirian fiskal daerah dapat dijelaskan melalui *mimetic isomorphism*. Pemerintah daerah cenderung meniru praktik terbaik yang telah diterapkan oleh daerah lain yang dianggap lebih maju dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peniruan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, memperbaiki tata kelola keuangan daerah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian (Ulfi *et al.*, 2022) yang menemukan temuan bahwa pelaksanaan e-government berpengaruh positif dan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan.

4.6.3 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel umur pemerintah daerah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,201 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 sehingga temuan ini bermakna bahwa hipotesis

ketiga (H3) yang menyatakan “Umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah” dinyatakan **DIDUKUNG**.

Umur pemerintah daerah menunjukkan lamanya suatu daerah menjalankan sistem pemerintahan sejak terbentuknya daerah tersebut. Semakin lama usia suatu pemerintah daerah, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki dalam mengelola administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengalaman tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam memahami potensi daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama usia suatu pemerintah daerah, maka semakin besar pula pengalaman dan kapasitas kelembagaan yang dimiliki dalam mengelola keuangan daerah. Kondisi tersebut dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih efektif dalam menggali potensi pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran secara mandiri.

Apabila dikaitkan dengan teori institusional, pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kemandirian fiskal daerah dapat dijelaskan melalui mekanisme *normative isomorphism*. Isomorfisme normatif muncul karena adanya pengaruh norma dan praktik-praktik pengelolaan

pemerintahan yang berkembang dalam lingkungan kelembagaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang telah berdiri lebih lama cenderung memiliki sumber daya manusia yang lebih berpengalaman dan profesional dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengalaman dan profesionalisme tersebut mendorong penerapan praktik pengelolaan keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, semakin lama usia pemerintah daerah, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian oleh Alfi & Sari (2023) yang menemukan temuan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.6.4 Pengaruh Temuan Audit terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel temuan audit menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,008 dan nilai signifikansi sebesar 0,032 sehingga temuan ini bermakna bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan “Temuan audit berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah” dinyatakan **DIDUKUNG**.

Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin banyak temuan audit yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, maka tingkat kemandirian fiskal daerah cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kelemahan dalam pengelolaan keuangan

daerah dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskalnya.

Temuan audit merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian, kelemahan pengendalian internal, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Semakin banyak temuan audit yang diperoleh suatu pemerintah daerah, maka hal tersebut dapat mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Apabila dikaitkan dengan teori agensi, hubungan antara temuan audit dan kemandirian fiskal daerah dapat dijelaskan melalui hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya dapat terjadi perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan audit yang dihasilkan dari proses pemeriksaan menjadi salah satu mekanisme pengawasan untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Semakin banyak temuan audit yang ditemukan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum berjalan secara optimal sehingga dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian oleh Chosidah & Mubarak (2025) yang menemukan temuan bahwa temuan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.6.5 Pengaruh Leverage terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel *leverage* menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 2,192 dan nilai signifikansi sebesar 0,022 sehingga temuan ini bermakna bahwa hipotesis kelima (H5) yang menyatakan “*Leverage* berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah” dinyatakan **TIDAK DIDUKUNG**.

Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* pemerintah daerah, maka kemandirian fiskal daerah juga cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kewajiban keuangan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan tingkat penggunaan utang dalam membiayai kegiatan pemerintahan daerah. Dalam keuangan daerah, *leverage* menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari kewajiban atau utang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tingkat *leverage* yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola kewajiban keuangan yang dimilikinya.

Hubungan antara leverage dan kemandirian fiskal daerah dapat dijelaskan melalui teori agensi, dimana pemerintah daerah bertindak sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam hubungan ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam perspektif teori agensi, penggunaan leverage atau utang dapat meningkatkan tekanan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena adanya kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin besar dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan, termasuk dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Rofiq & Indra (2021); Adinata & Efendi (2022) yang menemukan temuan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data mengenai pengaruh jumlah penduduk, indeks *e-government*, umur pemerintah daerah, temuan audit, dan *leverage* terhadap kemandirian fiskal daerah, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Artinya, semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah maka kemandirian fiskal daerah tersebut cenderung meningkat. Hal ini karena banyaknya penduduk dapat meningkatkan aktivitas ekonomi serta potensi penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri.

2. Indeks *E-Government*

Indeks *e-government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-government* pada pemerintah daerah, maka kemandirian fiskal daerah juga akan semakin meningkat. Penerapan *e-government* dapat membantu pemerintah

daerah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik sehingga pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih optimal.

3. Umur Pemerintah Daerah

Umur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini berarti semakin lama suatu pemerintah daerah berdiri, maka semakin baik pula kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah yang lebih lama berdiri memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam menggali potensi pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

4. Temuan Audit

Temuan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Artinya, semakin banyak temuan audit yang ditemukan, maka kemandirian fiskal daerah cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Banyaknya temuan audit dapat menjadi indikasi bahwa pengelolaan keuangan belum berjalan secara optimal sehingga dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskalnya.

5. *Leverage*

Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* pemerintah daerah, maka kemandirian fiskal daerah juga meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pemerintah daerah terdorong untuk mengelola keuangan

dan sumber pendapatan daerah dengan lebih baik agar mampu memenuhi kewajiban keuangannya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, terdapat kemungkinan jika data tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kondisi terbaru pada masing-masing daerah.
2. Tidak seluruh pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan secara lengkap melalui website resmi dan beberapa daerah belum melakukan pembaruan laporan keuangan secara berkala, sehingga ketersediaan data dalam penelitian ini menjadi terbatas.
3. Proses pengumpulan data dilakukan secara manual pada masing-masing website pemerintah daerah, yang menyebabkan waktu pengumpulan data relatif lebih lama serta meningkatkan potensi terjadinya kesalahan dalam pengambilan data.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dengan memberikan saran penggunaan teori institusional, khususnya konsep isomorfisme (koersif, mimetik, dan normatif) sebagai landasan dalam mengkaji kemandirian fiskal daerah. Pendekatan ini mampu menjelaskan bagaimana tekanan regulasi, proses peniruan kebijakan antar daerah, serta pengaruh profesionalisme dan standar kelembagaan membentuk kesamaan perilaku pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, teori institusional dinilai relevan dalam menjelaskan kesesuaian pengaruh variabel jumlah penduduk, indeks *e-government*, umur pemerintah daerah, temuan audit, dan *leverage* terhadap kemandirian fiskal daerah, serta dapat memperkuat pengembangan teori dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Saran Empiris

Secara empiris, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, seperti memaksimalkan penerimaan dari jumlah penduduk, meningkatkan pemanfaatan *e-government* dalam pengelolaan keuangan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan terutama pada daerah dengan umur pemerintahan yang relatif muda. Selain itu, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti temuan audit guna memperbaiki tata kelola keuangan dan mengelola *leverage* secara bijak agar tidak membebani keuangan daerah. Upaya-upaya

tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaki kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, M. P., & David, E. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(2), 1–14.
- Aksom, H., & Tymchenko, I. (2020). How Institutional Theories Explain And Fail To Explain Organizations. *Journal of Organizational Change Management*, 33(7), 1223–1252. <https://doi.org/10.1108/JOCM-05-2019-0130>.
- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1098–1114. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.750>.
- Alkhasani, M. R., & Murtanto. (2024). Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Atas Rekondasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(11), 6–28.
- Amyulianthy, R., Anto, A. S. U., & Budi, S. (2020). Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia)[Audit Finding And Audit Rectification On Audit Opinion (Case Study-Provincials Government Of Republic Indonesia)]. *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)*, 1(1), 14–27.
- Anggono, G. T., & Haryanto, H. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terhadap Indikasi Korupsi di Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1–13.
- Arib, M. F., Rahayu, M. S., Sidorj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Experimental Research Dalam Penelitian Pendidikan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5497–5511. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8468>.
- Arifin, J. (2024). Penguatan Praktik Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Perspektif Isomorfisme Teori Institusional. *Pidato Pengukuhan Profesor*, 1–

80. *Universitas Islam Indonesia.*

- Astuti, W., Widaryanti, & Wahyuningsih, P. (2022). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 49–57.
- Avianto, B. N., & Amelia, N. (2021). Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) di Sekretariat Jenderal MPR RI. *International Journal of Social and Public Administration*, 1(1), 1–12.
- Bahl, R. W., Linn, J. F., & Mondiale, B. (1992). *Urban Public Finance In Developing Countries* (1st ed., Vol. 165). New York: Oxford University Press.
- Basyit, A., Sutikno, B., & Dwiharto, J. (2020). The Influence of Education Level and Work Experience on Employee Performance. *Journal of EMA-Economics Management Accounting*, 5(1), 12–20.
- BPS. (2020). *Istilah Statistik Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik. https://sensus.bps.go.id/metadata_statistik/index/sp2020?page=5&per-page=10
- Chosidah, O. A. N., & Mubarak, A. Z. (2025). *Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023*. 07(4), 55–72.
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). the Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>.
- Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing Regional Finance Independence In Indonesian Local Governments. *European Journal of Business and Management Research*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178>.
- Fadhiilah, R., & Widiastuty, T. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Pada Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2020). *Review of Accounting and Business*, 4(1), 17–30.
- Fatma, A., & Ismanto, S. U. (2024). Analisis Pendapatan Daerah dalam Mengukur

- Kemandirian Daerah Kabupaten Bandung. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam: Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor*, 5(10), 4018–4028.
- Faud, M. R. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (1st ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, A., Setiawan, L., & Cahyono, C. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep. *Indonesian Journal of Business and Management*, 5(1), 133–140. <https://doi.org/10.35965/jbm.v5i1.1939>.
- Hasyim, M. A., & Ilham, R. (2025). Implementasi E-Government untuk Transparansi Laporan Keuangan di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2), 2321–2328. <https://doi.org/10.54082/jupin.1495>.
- Heeks, R. (2003). Most E-Government For Development Projects Fail: How Can Risks Be Reduced? *SSRN Electronic Journal*, 1–17.
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency Theory: Review Of The Theory And Current Research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>.
- Humaira, S., & Widyawati, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 14(3), 1–18.
- Imansari, N. (2023). *Metodologi Penelitian Untuk Pendidikan Kejuruan* (1st ed.). Madiun: Tim Kreatif Unipma Press.
- Jannah, R. (2021). Peran Kompetensi Auditor Terhadap Hasil Audit Investigasi Dalam Pembuktian Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 1(1), 54–64.
- Junus, A. A. Z., Vernanda, A., Gabriella, V., & Meiden, C. (2022). Audit Operasional dan Pengendalian Internal pada Masa Pandemi Terhadap

Efektivitas dan Efisiensi Pengendalian Kinerja Manajemen di PT Belvamas Maritim Indontama. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(2), 181–192.

Kemenkeu. (2025a, January 11). Ekonomi Indonesia 2024: Pertumbuhan Stabil Berkat Kebijakan Tepat. *Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Dan Fiskal*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2025/02/11/4527-ekonomi-indonesia-2024-pertumbuhan-stabil-berkat-kebijakan-tepat>

Kemenkeu. (2025b, July 9). Realisasi TKD Semester I 2025 Capai Rp400,6 Triliun, Dorong Pemerataan Layanan Publik. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-raker-dpd-juli-25>

Khasanah, V. D. N. (2023). *Pengaruh Jumlah Anggota DPRD, Jumlah Anggaran Belanja Daerah, Bimbingan Teknis, Pendidikan Kepala Daerah, dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].

Khoiriyah, N., & Triyonowati, T. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Aktivitas, dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Food And Beverages. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 8(1), 1–21.

Khotimah, S. N., Mustikowati, R. I., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(2), 1–13.

Kisworo, J., & Shauki, E. R. (2019). Teori Institusional dalam Penyusunan dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus pada Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 305–321.

Madjid, Z. (2025, April 29). 493 Daerah di RI Belum Mandiri, Tergantung Transferan Duit Pusat. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250429153050-4-629671/493-daerah-di-ri-belum-mandiri-tergantung-transferan-duit-pusat>

Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru* (3rd ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(1), 40–58.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Memon, M. A., Thurasamy, R., Ting, H., & Cheah, J. H. (2025). Purposive Sampling: a Review and Guidelines for Quantitative Research. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 9(1), 1–23. [https://doi.org/10.47263/JASEM.9\(1\)01](https://doi.org/10.47263/JASEM.9(1)01).
- MenPANRB, H. (2025). *Indeks SPBE Nasional Meningkat, Menteri Rini: Penguatan Integrasi Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-spbe-nasional-meningkat-menteri-rini-penguatan-integrasi-pelayanan-publik-berbasis-digital>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/226550>.
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., Fitra, F., Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., & Milasari, L. A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Bandung: Widina Media Utama.
- Munawaroh, K., & Sari, V. K. (2025). Pengaruh Tekanan Lingkungan Eksternal Terhadap Perilaku Organisasi Sektor Publik: Studi Pada Kelurahan Jepara, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(3), 505–511.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1980). *Public Finance In Theory And Practice* (1st ed.). Slovakia: McGraw-Hill Ryerson Limited.
- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustiawan, A. (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(2), 214–223. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i2.2559>.
- Napitupulu, D., Ananto Pamungkas, P. D., Sudarsono, B. G., Lestari, S. P., & Bani,

- A. U. (2020). Proposed Trutaut Model Of Technology Ddoption For Lapor! *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 725(1), 1–8. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/725/1/012120>.
- Nurhali, I. (2024). Analisis Perbandingan Alternatif Pembiayaan Daerah Untuk Membiayai Pembangunan Infrastruktur Daerah. *Defis: Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*, 15(15), 1–27.
- Oktavianti, Y. A., & Idayati, F. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(11), 1–20.
- Pratiwi, A. F. (2024). *Pengaruh Intergovernmental Revenue, Leverage, dan Ukuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 7911–7915.
- Putri, D. A. T. (2023). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Umur Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Putri, S. T., & Priyadi, M. P. (2021). Pengaruh Leverage, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(9), 1–16.
- Rahman, A. (2023). *Ekonomi Demografi dan Kependudukan*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Ramandhita, A. (2025, October 3). Dana Pemda Nganggur di Bank Tembus Rp233 Triliun per Agustus 2025. *Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi*. <https://rmol.id/politik/read/2025/10/03/682062/dana-pemda-nganggur-di-bank-tembus-rp233-triliun-per-agustus-2025>.
- Ridho, I. T. (2021). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, Dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia)*. [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].

- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 298–314.
- Riyantono, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (1st ed.). Sleman: Deepublish.
- Rofiq, I., & Arza, F. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 705–719.
- Rosyidah, A. M., & Wijaya, R. M. S. A. A. (2025). Professional Judgment Auditor Dalam Menentukan Kecukupan Bukti Audit Atas Akun Pendapatan Pada KAP SS. *Akuntansi Dan Manajemen*, 20(2), 134–147.
- Sabono, B. G., & Firmansyah, A. (2024). Pengaruh Infrastruktur dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2677–2685.
- Safitri, B. W., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2023). The Effect of PAD, Capital Expenditures, Government Size, and Budget Changes on Regional Financial Performance (In Central Java Province in 2019-2021). *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 10(4), 201–208.
- Santi, A., Herjayani, R., & Handayani, N. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan di Lembaga Pendidikan: Strategi dan Implementasi. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1515–1525.
- Saptati, R. (2025, November 4). Kemenkeu Dorong Transfer Daerah yang Kuat dan Tepat Sasaran, Realisasi Capai Rp644,9 Triliun - Media Keuangan. *Media Keuangan Kemenkeu*.
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemenkeu-dorong-transfer-daerah-yang-kuat-dan-tepat-sasaran-realisasi-capai-rp6449-triliun>
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425–1436.

- Saripudin, M. H. (2025). Penerapan Teori Institusional Dalam Organisasi Sektor Publik Di Indonesia: Pengaruh Tekanan Kelembagaan Terhadap Perubahan Kebijakan Internal. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 20(7), 1–8. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>.
- Shafira, M. A. R. (2024). *Analisis Pengaruh Panjang Jalan, PDRB, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Jawa Tengah Tahun 2014-2021* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Silalahi, R. A. P., & Nuswantara, D. A. (2024). Analisis Penyebab Temuan Berulang APBDES pada Audit Internal Inspektorat Daerah. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(2), 1043–1058. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i2.3007>.
- Simanjuntak, S. (2025, August 14). Daftar Kabupaten Kota Pemilik PAD di Bawah Rp100 Miliar, NTT dan Sumut Paling Banyak. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250814/10/1902232/daftar-kabupaten-kota-pemilik-pad-di-bawah-rp100-miliar-ntt-dan-sumut-paling-banyak>.
- Siregar, D. A., & Agoes, S. (2025). Audit Dan Transparansi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Dampaknya Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(11), 2655–2672.
- Sudrajat, A. M. (2023). Kualitas Audit Sebuah Systematic Literature Review. *Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 8(1), 40–70. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v8i1.2886>.
- Sujarweni, V. (2019). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunandar, A. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Pendidikan Kepala Daerah, dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Suryantini, N. S., Darmayanti, N. A., & Candraninggrat, I. R. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Prosiding Seminar*

Nasional AIMI, 32(1), 424–433.

- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1>.
- Ulfi, I. H., Afiah, N. N., & Mulyani, S. (2022). Implikasi Belanja Modal dan E-Government Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 5(2), 70–83.
- Utami, M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007-2016. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 283–292.
- Wana, D., & Juniartika, S. (2021). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. *Indonesian Society of Applied Science (ISAS)*, 9(1), 174–192.
- Wang, M., Zhang, H., Dang, D., Guan, J., He, Y., & Chen, Y. (2023). Fiscal Decentralization, Local Government Environmental Protection Preference, and Regional Green Innovation Efficiency: Evidence from China. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(36), 85466–85481.
- Wardani, A. K., & Ariani, K. R. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Kemandirian Daerah, Penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 1(1), 575–584.
- Widarjono, A. (2018). Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews. In *Buku Ekonometrika. Edisi (5th ed., Vol. 5)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widiatmoko, D. A., & Cahyono, Y. T. (2025). Pengaruh Balanced Scorecard, Leverage, dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2024). *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 9(2), 1–12.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Kabupaten dan Kota

No	Nama Daerah
1	Kabupaten Aceh Barat
2	Kabupaten Aceh Barat Daya
3	Kabupaten Aceh Besar
4	Kabupaten Aceh Tengah
5	Kabupaten Aceh Utara
6	Kabupaten Agam
7	Kabupaten Alor
8	Kabupaten Balangan
9	Kabupaten Balikpapan
10	Kabupaten Bandung Barat
11	Kabupaten Banggai Kepulauan
12	Kabupaten Banggai Laut
13	Kabupaten Bangkalan
14	Kabupaten Banjar
15	Kabupaten Banjarnegara
16	Kabupaten Bantul
17	Kabupaten Banyumas
18	Kabupaten Banyuwangi
19	Kabupaten Barru
20	Kabupaten Belu
21	Kabupaten Bener Meriah
22	Kabupaten Bengkalis
23	Kabupaten Bengkayang
24	Kabupaten Bima
25	Kabupaten Bireuen
26	Kabupaten Blitar
27	Kabupaten Bojonegoro
28	Kabupaten Bolaang Mongondow
29	Kabupaten Bombana
30	Kabupaten Boyolali
31	Kabupaten Buleleng

32	Kabupaten Bulungan
33	Kabupaten Buol
34	Kabupaten Buton Tengah
35	Kabupaten Buton Utara
36	Kabupaten Ciamis
37	Kabupaten Cianjur
38	Kabupaten Cilacap
39	Kabupaten Cirebon
40	Kabupaten Dairi
41	Kabupaten Demak
42	Kabupaten Dharmasraya
43	Kabupaten Dompu
44	Kabupaten Flores Timur
45	Kabupaten Gayo Lues
46	Kabupaten Gorontalo
47	Kabupaten Gowa
48	Kabupaten Gresik
49	Kabupaten Grobogan
50	Kabupaten Gunung Mas
51	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
52	Kabupaten Indramayu
53	Kabupaten Jayapura
54	Kabupaten Jember
55	Kabupaten Jepara
56	Kabupaten Jombang
57	Kabupaten Kapuas
58	Kabupaten Kapuas Hulu
59	Kabupaten Karanganyar
60	Kabupaten Karawang
61	Kabupaten Katingan
62	Kabupaten Kaur
63	Kabupaten Kebumen
64	Kabupaten Kepulauan Anambas
65	Kabupaten Kepulauan Sangihe
66	Kabupaten Klaten
67	Kabupaten Kolaka
68	Kabupaten Konawe Utara
69	Kabupaten Kudus
70	Kabupaten Kutai Kertanegara

71	Kabupaten Lamandau
72	Kabupaten Lamongan
73	Kabupaten Lampung Barat
74	Kabupaten Lampung Tengah
75	Kabupaten Lampung Timur
76	Kabupaten Lombok Barat
77	Kabupaten Lombok Tengah
78	Kabupaten Lumajang
79	Kabupaten Madiun
80	Kabupaten Magetan
81	Kabupaten Majalengka
82	Kabupaten Mandailing Natal
83	Kabupaten Manggarai
84	Kabupaten Manggarai Barat
85	Kabupaten Manggarai Timur
86	Kabupaten Mempawah
87	Kabupaten Merangin
88	Kabupaten Morowali
89	Kabupaten Muara Enim
90	Kabupaten Musi Banyuasin
91	Kabupaten Musi Rawas
92	Kabupaten Nagekeo
93	Kabupaten Ngada
94	Kabupaten Nganjuk
95	Kabupaten Ngawi
96	Kabupaten Nias
97	Kabupaten Ogan Ilir
98	Kabupaten Padang Pariaman
99	Kabupaten Pakpak Barat
100	Kabupaten Pamekasan
101	Kabupaten Pangandaran
102	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
103	Kabupaten Parigi Moutong
104	Kabupaten Pasaman
105	Kabupaten Pasuruan
106	Kabupaten Pelalawan
107	Kabupaten Pematang
108	Kabupaten Penajam Paser Utara
109	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

110	Kabupaten Pesisir Barat
111	Kabupaten Pidie Jaya
112	Kabupaten Polewali Mandar
113	Kabupaten Ponorogo
114	Kabupaten Poso
115	Kabupaten Probolinggo
116	Kabupaten Pulang Pisau
117	Kabupaten Pulau Morotai
118	Kabupaten Purwakarta
119	Kabupaten Purworejo
120	Kabupaten Rejang Lebong
121	Kabupaten Rembang
122	Kabupaten Rokan Hulu
123	Kabupaten Rote Ndao
124	Kabupaten Sabu Raijua
125	Kabupaten Samosir
126	Kabupaten Sanggau
127	Kabupaten Sarolangun
128	Kabupaten Sekadau
129	Kabupaten Seram Bagian Timur
130	Kabupaten Serang
131	Kabupaten Siak
132	Kabupaten Sidenreng Rappang
133	Kabupaten Sidoarjo
134	Kabupaten Sintang
135	Kabupaten Situbondo
136	Kabupaten Sleman
137	Kabupaten Solok
138	Kabupaten Subang
139	Kabupaten Sukamara
140	Kabupaten Sukoharjo
141	Kabupaten Sumba Timur
142	Kabupaten Sumedang
143	Kabupaten Sumenep
144	Kabupaten Tabanan
145	Kabupaten Tana Tidung
146	Kabupaten Tana Toraja
147	Kabupaten Tanah Bumbu
148	Kabupaten Tanah Laut

149	Kabupaten Tapanuli Selatan
150	Kabupaten Tapanuli Tengah
151	Kabupaten Tapanuli Utara
152	Kabupaten Tasikmalaya
153	Kabupaten Tebo
154	Kabupaten Tegal
155	Kabupaten Temanggung
156	Kabupaten Timor Tengah Selatan
157	Kabupaten Timor Tengah Utara
158	Kabupaten Tolitoli
159	Kabupaten Toraja Utara
160	Kabupaten Tuban
161	Kabupaten Tulang Bawang
162	Kabupaten Way Kanan
163	Kota Ambon
164	Kota Banda Aceh
165	Kota Banjarmasin
166	Kota Bogor
167	Kota Bontang
168	Kota Bukittinggi
169	Kota Gunungsitoli
170	Kota Jambi
171	Kota Langsa
172	Kota Lhokseumawe
173	Kota Mataram
174	Kota Medan
175	Kota Pariaman
176	Kota Pekanbaru
177	Kota Pontianak
178	Kota Sabang
179	Kota Sibolga
180	Kota Singkawang
181	Kota Subulussalam
182	Kota Sungai Penuh
183	Kota Surakarta
184	Kota Tanjungbalai
185	Kota Tanjungpinang
186	Kota Tomohon

Lampiran 2

Jumlah Penduduk

No	Kabupaten dan Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Kabupaten Aceh Barat	207,690
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	155,000
3	Kabupaten Aceh Besar	435,300
4	Kabupaten Aceh Tengah	227,170
5	Kabupaten Aceh Utara	627,540
6	Kabupaten Agam	532,178
7	Kabupaten Alor	224,310
8	Kabupaten Balangan	136,520
9	Kabupaten Balikpapan	717,230
10	Kabupaten Bandung Barat	1,884,190
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	130,008
12	Kabupaten Banggai Laut	77,395
13	Kabupaten Bangkalan	1,024,581
14	Kabupaten Banjar	580,100
15	Kabupaten Banjarnegara	1,057,560
16	Kabupaten Bantul	1,106,992
17	Kabupaten Banyumas	1,847,100
18	Kabupaten Banyuwangi	1,743,900
19	Kabupaten Barru	195,380
20	Kabupaten Belu	232,788
21	Kabupaten Bener Meriah	175,780
22	Kabupaten Bengkalis	591,800
23	Kabupaten Bengkayang	303,422
24	Kabupaten Bima	538,440
25	Kabupaten Bireuen	458,980
26	Kabupaten Blitar	1,253,600
27	Kabupaten Bojonegoro	1,319,600
28	Kabupaten Bolaang Mongondow	255,900
29	Kabupaten Bombana	1,677,200
30	Kabupaten Boyolali	1,099,850
31	Kabupaten Buleleng	814,800
32	Kabupaten Bulungan	170,239

33	Kabupaten Buol	148,246
34	Kabupaten Buton Tengah	120,420
35	Kabupaten Buton Utara	73,766
36	Kabupaten Ciamis	1,259,230
37	Kabupaten Cianjur	2,584,990
38	Kabupaten Cilacap	2,027,380
39	Kabupaten Cirebon	2,387,960
40	Kabupaten Dairi	329,341
41	Kabupaten Demak	1,252,970
42	Kabupaten Dharmasraya	240,160
43	Kabupaten Dompu	267,440
44	Kabupaten Flores Timur	289,380
45	Kabupaten Gayo Lues	106,140
46	Kabupaten Gorontalo	376,901
47	Kabupaten Gowa	825,369
48	Kabupaten Gresik	1,350,400
49	Kabupaten Grobogan	1,506,370
50	Kabupaten Gunung Mas	134,482
51	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	237,320
52	Kabupaten Indramayu	1,914,040
53	Kabupaten Jayapura	203,772
54	Kabupaten Jember	2,586,800
55	Kabupaten Jepara	1,232,880
56	Kabupaten Jombang	1,351,300
57	Kabupaten Kapuas	416,300
58	Kabupaten Kapuas Hulu	274,920
59	Kabupaten Karanganyar	961,910
60	Kabupaten Karawang	2,554,380
61	Kabupaten Katingan	179,950
62	Kabupaten Kaur	135,182
63	Kabupaten Kebumen	1,446,833
64	Kabupaten Kepulauan Anambas	50,073
65	Kabupaten Kepulauan Sangihe	137,450
66	Kabupaten Klaten	1,292,800
67	Kabupaten Kolaka	257,733
68	Kabupaten Konawe Utara	81,355
69	Kabupaten Kudus	883,320
70	Kabupaten Kutai Kertanegara	789,770
71	Kabupaten Lamandau	112,441

72	Kabupaten Lamongan	1,369,500
73	Kabupaten Lampung Barat	312,380
74	Kabupaten Lampung Tengah	1,525,088
75	Kabupaten Lampung Timur	1,153,770
76	Kabupaten Lombok Barat	742,820
77	Kabupaten Lombok Tengah	1,100,000
78	Kabupaten Lumajang	1,110,000
79	Kabupaten Madiun	754,500
80	Kabupaten Magetan	681,700
81	Kabupaten Majalengka	1,352,540
82	Kabupaten Mandailing Natal	501,618
83	Kabupaten Manggarai	337,010
84	Kabupaten Manggarai Barat	278,180
85	Kabupaten Manggarai Timur	287,360
86	Kabupaten Mempawah	316,728
87	Kabupaten Merangin	397,461
88	Kabupaten Morowali	190,450
89	Kabupaten Muara Enim	645,250
90	Kabupaten Musi Banyuasin	210,482
91	Kabupaten Musi Rawas	425,150
92	Kabupaten Nagekeo	164,457
93	Kabupaten Ngada	174,088
94	Kabupaten Nganjuk	1,124,700
95	Kabupaten Ngawi	907,002
96	Kabupaten Nias	1,004,760
97	Kabupaten Ogan Ilir	2,828,020
98	Kabupaten Padang Pariaman	457,530
99	Kabupaten Pakpak Barat	57,152
100	Kabupaten Pamekasan	920,510
101	Kabupaten Pangandaran	434,100
102	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	360,004
103	Kabupaten Parigi Moutong	461,576
104	Kabupaten Pasaman	313,200
105	Kabupaten Pasuruan	1,644,500
106	Kabupaten Pelalawan	414,900
107	Kabupaten Pematang	1,541,685
108	Kabupaten Penajam Paser Utara	267,690
109	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	212,220
110	Kabupaten Pesisir Barat	175,770

111	Kabupaten Pidie Jaya	163,590
112	Kabupaten Polewali Mandar	490,029
113	Kabupaten Ponorogo	959,500
114	Kabupaten Poso	253,350
115	Kabupaten Probolinggo	1,176,900
116	Kabupaten Pulang Pisau	144,663
117	Kabupaten Pulau Morotai	82,913
118	Kabupaten Purwakarta	1,063,932
119	Kabupaten Purworejo	795,030
120	Kabupaten Rejang Lebong	288,252
121	Kabupaten Rembang	665,240
122	Kabupaten Rokan Hulu	579,685
123	Kabupaten Rote Ndao	152,613
124	Kabupaten Sabu Raijua	94,860
125	Kabupaten Samosir	149,875
126	Kabupaten Sanggau	510,412
127	Kabupaten Sarolangun	310,290
128	Kabupaten Sekadau	222,510
129	Kabupaten Seram Bagian Timur	139,780
130	Kabupaten Serang	743,750
131	Kabupaten Siak	483,800
132	Kabupaten Sidenreng Rappang	330,198
133	Kabupaten Sidoarjo	2,148,600
134	Kabupaten Sintang	443,684
135	Kabupaten Situbondo	697,000
136	Kabupaten Sleman	1,335,947
137	Kabupaten Solok	413,070
138	Kabupaten Subang	1,663,160
139	Kabupaten Sukamara	67,234
140	Kabupaten Sukoharjo	941,650
141	Kabupaten Sumba Timur	265,880
142	Kabupaten Sumedang	1,187,130
143	Kabupaten Sumenep	1,143,002
144	Kabupaten Tabanan	467,700
145	Kabupaten Tana Tidung	30,036
146	Kabupaten Tana Toraja	258,260
147	Kabupaten Tanah Bumbu	346,340
148	Kabupaten Tanah Laut	364,120
149	Kabupaten Tapanuli Selatan	322,377

150	Kabupaten Tapanuli Tengah	367,798
151	Kabupaten Tapanuli Utara	329,252
152	Kabupaten Tasikmalaya	757,815
153	Kabupaten Tebo	367,251
154	Kabupaten Tegal	1,727,497
155	Kabupaten Temanggung	814,880
156	Kabupaten Timor Tengah Selatan	475,350
157	Kabupaten Timor Tengah Utara	272,100
158	Kabupaten Tolitoli	242,783
159	Kabupaten Toraja Utara	266,513
160	Kabupaten Tuban	1,218,600
161	Kabupaten Tulang Bawang	433,570
162	Kabupaten Way Kanan	493,071
163	Kota Ambon	355,370
164	Kota Banda Aceh	259,540
165	Kota Banjarmasin	678,240
166	Kota Bogor	1,078,350
167	Kota Bontang	188,290
168	Kota Bukittinggi	125,015
169	Kota Gunungsitoli	138,297
170	Kota Jambi	641,020
171	Kota Langsa	182,470
172	Kota Lhokseumawe	196,070
173	Kota Mataram	457,250
174	Kota Medan	2,486,283
175	Kota Pariaman	101,680
176	Kota Pekalongan	321,095
177	Kota Pekanbaru	1,026,700
178	Kota Pontianak	680,852
179	Kota Sabang	42,790
180	Kota Sibolga	100,282
181	Kota Singkawang	249,998
182	Kota Subulussalam	107,185
183	Kota Sungai Penuh	102,224
184	Kota Surakarta	589,242
185	Kota Tanjungbalai	186,150
186	Kota Tanjungpinang	237,580
187	Kota Tomohon	103,210

Lampiran 3

Indeks *E-Government*

No	Kabupaten dan Kota	Indeks <i>E-Government</i>
1	Kabupaten Aceh Barat	2.69
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	2.86
3	Kabupaten Aceh Besar	2.39
4	Kabupaten Aceh Tengah	2.48
5	Kabupaten Aceh Utara	1.44
6	Kabupaten Agam	2.56
7	Kabupaten Alor	2.19
8	Kabupaten Balangan	3.34
9	Kabupaten Balikpapan	3.96
10	Kabupaten Bandung Barat	3.78
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	2.55
12	Kabupaten Banggai Laut	2.11
13	Kabupaten Bangkalan	2.92
14	Kabupaten Banjar	2.87
15	Kabupaten Banjarnegara	3.72
16	Kabupaten Bantul	4.18
17	Kabupaten Banyumas	4.09
18	Kabupaten Banyuwangi	4.77
19	Kabupaten Barru	2.79
20	Kabupaten Belu	2.47
21	Kabupaten Bener Meriah	2.66
22	Kabupaten Bengkulu	2.79
23	Kabupaten Bengkayang	3.12
24	Kabupaten Bima	2.52
25	Kabupaten Bireuen	2.32
26	Kabupaten Blitar	3.77
27	Kabupaten Bojonegoro	4.14
28	Kabupaten Bolaang Mongondow	2.73
29	Kabupaten Bombana	4.63
30	Kabupaten Boyolali	3.89
31	Kabupaten Buleleng	3.69

32	Kabupaten Bulungan	3.93
33	Kabupaten Buol	3.19
34	Kabupaten Buton Tengah	2.63
35	Kabupaten Buton Utara	2.19
36	Kabupaten Ciamis	3.65
37	Kabupaten Cianjur	3.75
38	Kabupaten Cilacap	3.27
39	Kabupaten Cirebon	4.13
40	Kabupaten Dairi	2.69
41	Kabupaten Demak	3.93
42	Kabupaten Dharmasraya	3.61
43	Kabupaten Dompu	2.52
44	Kabupaten Flores Timur	2.1
45	Kabupaten Gayo Lues	2.69
46	Kabupaten Gorontalo	2.82
47	Kabupaten Gowa	3.63
48	Kabupaten Gresik	4.32
49	Kabupaten Grobogan	3.57
50	Kabupaten Gunung Mas	2.74
51	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4.09
52	Kabupaten Indramayu	3.93
53	Kabupaten Jayapura	2.82
54	Kabupaten Jember	3.54
55	Kabupaten Jepara	3.51
56	Kabupaten Jombang	3.91
57	Kabupaten Kapuas	2.63
58	Kabupaten Kapuas Hulu	2.82
59	Kabupaten Karanganyar	3.9
60	Kabupaten Karawang	4.4
61	Kabupaten Katingan	3.8
62	Kabupaten Kaur	2.42
63	Kabupaten Kebumen	4.07
64	Kabupaten Kepulauan Anambas	3.04
65	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.46
66	Kabupaten Klaten	4.07
67	Kabupaten Kolaka	3.68
68	Kabupaten Konawe Utara	2.85
69	Kabupaten Kudus	4.23
70	Kabupaten Kutai Kertanegara	3.09

71	Kabupaten Lamandau	3.15
72	Kabupaten Lamongan	4.18
73	Kabupaten Lampung Barat	2.62
74	Kabupaten Lampung Tengah	2.68
75	Kabupaten Lampung Timur	2.84
76	Kabupaten Lombok Barat	3.05
77	Kabupaten Lombok Tengah	3.04
78	Kabupaten Lumajang	3.39
79	Kabupaten Madiun	4.31
80	Kabupaten Magetan	2.92
81	Kabupaten Majalengka	2.94
82	Kabupaten Mandailing Natal	2.89
83	Kabupaten Manggarai	2.9
84	Kabupaten Manggarai Barat	3.47
85	Kabupaten Manggarai Timur	2.64
86	Kabupaten Mempawah	2.73
87	Kabupaten Merangin	3.2
88	Kabupaten Morowali	3.25
89	Kabupaten Muara Enim	3.29
90	Kabupaten Musi Banyuasin	4.07
91	Kabupaten Musi Rawas	3.09
92	Kabupaten Nagekeo	1.77
93	Kabupaten Ngada	2.17
94	Kabupaten Nganjuk	3.84
95	Kabupaten Ngawi	3.61
96	Kabupaten Nias	4.34
97	Kabupaten Ogan Ilir	3.95
98	Kabupaten Padang Pariaman	3.51
99	Kabupaten Pakpak Barat	2.66
100	Kabupaten Pamekasan	3.79
101	Kabupaten Pangandaran	3.56
102	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	2.64
103	Kabupaten Parigi Moutong	2.72
104	Kabupaten Pasaman	2.67
105	Kabupaten Pasuruan	3.88
106	Kabupaten Pelalawan	2.5
107	Kabupaten Pematang	3.04
108	Kabupaten Penajam Paser Utara	2.87
109	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	2.66

110	Kabupaten Pesisir Barat	2.94
111	Kabupaten Pidie Jaya	2.61
112	Kabupaten Polewali Mandar	3.88
113	Kabupaten Ponorogo	3.07
114	Kabupaten Poso	2.52
115	Kabupaten Probolinggo	3.97
116	Kabupaten Pulang Pisau	3.16
117	Kabupaten Pulau Morotai	1.97
118	Kabupaten Purwakarta	3.94
119	Kabupaten Purworejo	3.49
120	Kabupaten Rejang Lebong	3.24
121	Kabupaten Rembang	3.99
122	Kabupaten Rokan Hulu	3.46
123	Kabupaten Rote Ndao	3.35
124	Kabupaten Sabu Raijua	1.84
125	Kabupaten Samosir	2.7
126	Kabupaten Sanggau	3.29
127	Kabupaten Sarolangun	3.1
128	Kabupaten Sekadau	3.13
129	Kabupaten Seram Bagian Timur	2.41
130	Kabupaten Serang	3.73
131	Kabupaten Siak	3.54
132	Kabupaten Sidenreng Rappang	3.04
133	Kabupaten Sidoarjo	3.96
134	Kabupaten Sintang	2.3
135	Kabupaten Situbondo	4.21
136	Kabupaten Sleman	4.3
137	Kabupaten Solok	3.49
138	Kabupaten Subang	3.38
139	Kabupaten Sukamara	2.75
140	Kabupaten Sukoharjo	4.45
141	Kabupaten Sumba Timur	2.56
142	Kabupaten Sumedang	4.51
143	Kabupaten Sumenep	3.73
144	Kabupaten Tabanan	3.54
145	Kabupaten Tana Tidung	2.84
146	Kabupaten Tana Toraja	2.75
147	Kabupaten Tanah Bumbu	3.3
148	Kabupaten Tanah Laut	3.12

149	Kabupaten Tapanuli Selatan	3.14
150	Kabupaten Tapanuli Tengah	2.38
151	Kabupaten Tapanuli Utara	2.85
152	Kabupaten Tasikmalaya	3.76
153	Kabupaten Tebo	2.62
154	Kabupaten Tegal	3.95
155	Kabupaten Temanggung	3.64
156	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2.83
157	Kabupaten Timor Tengah Utara	2.43
158	Kabupaten Tolitoli	2.49
159	Kabupaten Toraja Utara	2.31
160	Kabupaten Tuban	4.24
161	Kabupaten Tulang Bawang	2.85
162	Kabupaten Way Kanan	3.52
163	Kota Ambon	2.64
164	Kota Banda Aceh	3.7
165	Kota Banjarmasin	4.06
166	Kota Bogor	4.1
167	Kota Bontang	3.39
168	Kota Bukittinggi	2.49
169	Kota Gunungsitoli	2.23
170	Kota Jambi	4.32
171	Kota Langsa	1.95
172	Kota Lhokseumawe	2.8
173	Kota Mataram	3.55
174	Kota Medan	3.67
175	Kota Pariaman	3.44
176	Kota Pekalongan	3.05
177	Kota Pekanbaru	3.85
178	Kota Pontianak	3.49
179	Kota Sabang	3.02
180	Kota Sibolga	2.41
181	Kota Singkawang	3.35
182	Kota Subulussalam	2.48
183	Kota Sungai Penuh	3.14
184	Kota Surakarta	4.3
185	Kota Tanjungbalai	3.24
186	Kota Tanjungpinang	3.25
187	Kota Tomohon	3.03

Lampiran 4

Umur Pemerintah Daerah

No	Nama Daerah	Umur Pemerintah Daerah
1	Kabupaten Aceh Barat	68
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	22
3	Kabupaten Aceh Besar	68
4	Kabupaten Aceh Tengah	68
5	Kabupaten Aceh Utara	68
6	Kabupaten Agam	68
7	Kabupaten Alor	66
8	Kabupaten Balangan	21
9	Kabupaten Balikpapan	65
10	Kabupaten Bandung Barat	17
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	25
12	Kabupaten Banggai Laut	11
13	Kabupaten Bangkalan	74
14	Kabupaten Banjar	65
15	Kabupaten Banjarnegara	74
16	Kabupaten Bantul	74
17	Kabupaten Banyumas	74
18	Kabupaten Banyuwangi	74
19	Kabupaten Barru	65
20	Kabupaten Belu	66
21	Kabupaten Bener Meriah	21
22	Kabupaten Bengkulu	68
23	Kabupaten Bengkayang	25
24	Kabupaten Bima	66
25	Kabupaten Bireuen	25
26	Kabupaten Blitar	74
27	Kabupaten Bojonegoro	74
28	Kabupaten Bolaang Mongondow	65
29	Kabupaten Bombana	74
30	Kabupaten Boyolali	74
31	Kabupaten Buleleng	66

32	Kabupaten Bulungan	65
33	Kabupaten Buol	25
34	Kabupaten Buton Tengah	10
35	Kabupaten Buton Utara	17
36	Kabupaten Ciamis	74
37	Kabupaten Cianjur	74
38	Kabupaten Cilacap	74
39	Kabupaten Cirebon	74
40	Kabupaten Dairi	60
41	Kabupaten Demak	74
42	Kabupaten Dharmasraya	21
43	Kabupaten Dompu	66
44	Kabupaten Flores Timur	66
45	Kabupaten Gayo Lues	22
46	Kabupaten Gorontalo	65
47	Kabupaten Gowa	65
48	Kabupaten Gresik	50
49	Kabupaten Grobogan	74
50	Kabupaten Gunung Mas	22
51	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	65
52	Kabupaten Indramayu	74
53	Kabupaten Jayapura	55
54	Kabupaten Jember	74
55	Kabupaten Jepara	74
56	Kabupaten Jombang	74
57	Kabupaten Kapuas	65
58	Kabupaten Kapuas Hulu	65
59	Kabupaten Karanganyar	74
60	Kabupaten Karawang	74
61	Kabupaten Katingan	22
62	Kabupaten Kaur	21
63	Kabupaten Kebumen	74
64	Kabupaten Kepulauan Anambas	16
65	Kabupaten Kepulauan Sangihe	65
66	Kabupaten Klaten	74
67	Kabupaten Kolaka	65
68	Kabupaten Konawe Utara	17
69	Kabupaten Kudus	74
70	Kabupaten Kutai Kertanegara	65

71	Kabupaten Lamandau	22
72	Kabupaten Lamongan	74
73	Kabupaten Lampung Barat	33
74	Kabupaten Lampung Tengah	65
75	Kabupaten Lampung Timur	25
76	Kabupaten Lombok Barat	66
77	Kabupaten Lombok Tengah	66
78	Kabupaten Lumajang	74
79	Kabupaten Madiun	74
80	Kabupaten Magetan	74
81	Kabupaten Majalengka	74
82	Kabupaten Mandailing Natal	26
83	Kabupaten Manggarai	66
84	Kabupaten Manggarai Barat	21
85	Kabupaten Manggarai Timur	17
86	Kabupaten Mempawah	65
87	Kabupaten Merangin	68
88	Kabupaten Morowali	25
89	Kabupaten Muara Enim	65
90	Kabupaten Musi Banyuasin	21
91	Kabupaten Musi Rawas	65
92	Kabupaten Nagekeo	17
93	Kabupaten Ngada	66
94	Kabupaten Nganjuk	74
95	Kabupaten Ngawi	74
96	Kabupaten Nias	74
97	Kabupaten Ogan Ilir	74
98	Kabupaten Padang Pariaman	68
99	Kabupaten Pakpak Barat	21
100	Kabupaten Pamekasan	74
101	Kabupaten Pangandaran	12
102	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	65
103	Kabupaten Parigi Moutong	22
104	Kabupaten Pasaman	68
105	Kabupaten Pasuruan	74
106	Kabupaten Pelalawan	25
107	Kabupaten Pematang	74
108	Kabupaten Penajam Paser Utara	22
109	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	11

110	Kabupaten Pesisir Barat	12
111	Kabupaten Pidie Jaya	17
112	Kabupaten Polewali Mandar	65
113	Kabupaten Ponorogo	74
114	Kabupaten Poso	65
115	Kabupaten Probolinggo	74
116	Kabupaten Pulang Pisau	22
117	Kabupaten Pulau Morotai	16
118	Kabupaten Purwakarta	74
119	Kabupaten Purworejo	74
120	Kabupaten Rejang Lebong	65
121	Kabupaten Rembang	74
122	Kabupaten Rokan Hulu	25
123	Kabupaten Rote Ndao	22
124	Kabupaten Sabu Raijua	16
125	Kabupaten Samosir	21
126	Kabupaten Sanggau	65
127	Kabupaten Sarolangun	25
128	Kabupaten Sekadau	21
129	Kabupaten Seram Bagian Timur	21
130	Kabupaten Serang	74
131	Kabupaten Siak	25
132	Kabupaten Sidenreng Rappang	65
133	Kabupaten Sidoarjo	74
134	Kabupaten Sintang	65
135	Kabupaten Situbondo	74
136	Kabupaten Sleman	74
137	Kabupaten Solok	68
138	Kabupaten Subang	56
139	Kabupaten Sukamara	22
140	Kabupaten Sukoharjo	74
141	Kabupaten Sumba Timur	66
142	Kabupaten Sumedang	74
143	Kabupaten Sumenep	74
144	Kabupaten Tabanan	66
145	Kabupaten Tana Tidung	17
146	Kabupaten Tana Toraja	65
147	Kabupaten Tanah Bumbu	21
148	Kabupaten Tanah Laut	59

149	Kabupaten Tapanuli Selatan	68
150	Kabupaten Tapanuli Tengah	68
151	Kabupaten Tapanuli Utara	68
152	Kabupaten Tasikmalaya	74
153	Kabupaten Tebo	25
154	Kabupaten Tegal	74
155	Kabupaten Temanggung	74
156	Kabupaten Timor Tengah Selatan	66
157	Kabupaten Timor Tengah Utara	66
158	Kabupaten Tolitoli	65
159	Kabupaten Toraja Utara	16
160	Kabupaten Tuban	74
161	Kabupaten Tulang Bawang	27
162	Kabupaten Way Kanan	25
163	Kota Ambon	69
164	Kota Banda Aceh	68
165	Kota Banjarmasin	65
166	Kota Bogor	74
167	Kota Bontang	25
168	Kota Bukittinggi	68
169	Kota Gunungsitoli	16
170	Kota Jambi	66
171	Kota Langsa	23
172	Kota Lhokseumawe	23
173	Kota Mataram	31
174	Kota Medan	68
175	Kota Pariaman	22
176	Kota Pekalongan	74
177	Kota Pekanbaru	68
178	Kota Pontianak	65
179	Kota Sabang	59
180	Kota Sibolga	68
181	Kota Singkawang	23
182	Kota Subulussalam	17
183	Kota Sungai Penuh	16
184	Kota Surakarta	74
185	Kota Tanjungbalai	68
186	Kota Tanjungpinang	23
187	Kota Tomohon	21

Lampiran 5

Temuan Audit

No	Nama Daerah	Temuan Audit
1	Kabupaten Aceh Barat	31
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	35
3	Kabupaten Aceh Besar	11
4	Kabupaten Aceh Tengah	27
5	Kabupaten Aceh Utara	23
6	Kabupaten Agam	25
7	Kabupaten Alor	20
8	Kabupaten Balangan	16
9	Kabupaten Balikpapan	16
10	Kabupaten Bandung Barat	22
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	14
12	Kabupaten Banggai Laut	16
13	Kabupaten Bangkalan	16
14	Kabupaten Banjar	20
15	Kabupaten Banjarnegara	14
16	Kabupaten Bantul	17
17	Kabupaten Banyumas	13
18	Kabupaten Banyuwangi	22
19	Kabupaten Barru	12
20	Kabupaten Belu	20
21	Kabupaten Bener Meriah	14
22	Kabupaten Bengkulu	16
23	Kabupaten Bengkayang	14
24	Kabupaten Bima	16
25	Kabupaten Bireuen	11
26	Kabupaten Blitar	15
27	Kabupaten Bojonegoro	24
28	Kabupaten Bolaang Mongondow	23
29	Kabupaten Bombana	26
30	Kabupaten Boyolali	9
31	Kabupaten Buleleng	23

32	Kabupaten Bulungan	16
33	Kabupaten Buol	24
34	Kabupaten Buton Tengah	12
35	Kabupaten Buton Utara	14
36	Kabupaten Ciamis	24
37	Kabupaten Cianjur	25
38	Kabupaten Cilacap	13
39	Kabupaten Cirebon	34
40	Kabupaten Dairi	14
41	Kabupaten Demak	9
42	Kabupaten Dharmasraya	10
43	Kabupaten Dompu	11
44	Kabupaten Flores Timur	8
45	Kabupaten Gayo Lues	24
46	Kabupaten Gorontalo	23
47	Kabupaten Gowa	33
48	Kabupaten Gresik	26
49	Kabupaten Grobogan	7
50	Kabupaten Gunung Mas	13
51	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	11
52	Kabupaten Indramayu	18
53	Kabupaten Jayapura	9
54	Kabupaten Jember	15
55	Kabupaten Jepara	5
56	Kabupaten Jombang	10
57	Kabupaten Kapuas	24
58	Kabupaten Kapuas Hulu	23
59	Kabupaten Karanganyar	11
60	Kabupaten Karawang	20
61	Kabupaten Katingan	34
62	Kabupaten Kaur	26
63	Kabupaten Kebumen	15
64	Kabupaten Kepulauan Anambas	12
65	Kabupaten Kepulauan Sangihe	34
66	Kabupaten Klaten	13
67	Kabupaten Kolaka	21
68	Kabupaten Konawe Utara	31
69	Kabupaten Kudus	12
70	Kabupaten Kutai Kertanegara	39

71	Kabupaten Lamandau	23
72	Kabupaten Lamongan	15
73	Kabupaten Lampung Barat	46
74	Kabupaten Lampung Tengah	37
75	Kabupaten Lampung Timur	24
76	Kabupaten Lombok Barat	32
77	Kabupaten Lombok Tengah	19
78	Kabupaten Lumajang	21
79	Kabupaten Madiun	10
80	Kabupaten Magetan	11
81	Kabupaten Majalengka	16
82	Kabupaten Mandailing Natal	22
83	Kabupaten Manggarai	13
84	Kabupaten Manggarai Barat	19
85	Kabupaten Manggarai Timur	9
86	Kabupaten Mempawah	12
87	Kabupaten Merangin	21
88	Kabupaten Morowali	21
89	Kabupaten Muara Enim	34
90	Kabupaten Musi Banyuasin	44
91	Kabupaten Musi Rawas	32
92	Kabupaten Nagekeo	11
93	Kabupaten Ngada	9
94	Kabupaten Nganjuk	13
95	Kabupaten Ngawi	6
96	Kabupaten Nias	12
97	Kabupaten Ogan Ilir	35
98	Kabupaten Padang Pariaman	26
99	Kabupaten Pakpak Barat	15
100	Kabupaten Pamekasan	13
101	Kabupaten Pangandaran	15
102	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	31
103	Kabupaten Parigi Moutong	18
104	Kabupaten Pasaman	24
105	Kabupaten Pasuruan	18
106	Kabupaten Pelalawan	17
107	Kabupaten Pematang	10
108	Kabupaten Penajam Paser Utara	22
109	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	25

110	Kabupaten Pesisir Barat	21
111	Kabupaten Pidie Jaya	17
112	Kabupaten Polewali Mandar	38
113	Kabupaten Ponorogo	15
114	Kabupaten Poso	35
115	Kabupaten Probolinggo	10
116	Kabupaten Pulang Pisau	13
117	Kabupaten Pulau Morotai	24
118	Kabupaten Purwakarta	22
119	Kabupaten Purworejo	7
120	Kabupaten Rejang Lebong	29
121	Kabupaten Rembang	13
122	Kabupaten Rokan Hulu	19
123	Kabupaten Rote Ndao	21
124	Kabupaten Sabu Raijua	10
125	Kabupaten Samosir	18
126	Kabupaten Sanggau	16
127	Kabupaten Sarolangun	18
128	Kabupaten Sekadau	29
129	Kabupaten Seram Bagian Timur	38
130	Kabupaten Serang	22
131	Kabupaten Siak	14
132	Kabupaten Sidenreng Rappang	22
133	Kabupaten Sidoarjo	19
134	Kabupaten Sintang	19
135	Kabupaten Situbondo	17
136	Kabupaten Sleman	23
137	Kabupaten Solok	20
138	Kabupaten Subang	22
139	Kabupaten Sukamara	12
140	Kabupaten Sukoharjo	4
141	Kabupaten Sumba Timur	13
142	Kabupaten Sumedang	15
143	Kabupaten Sumenep	8
144	Kabupaten Tabanan	10
145	Kabupaten Tana Tidung	32
146	Kabupaten Tana Toraja	30
147	Kabupaten Tanah Bumbu	17
148	Kabupaten Tanah Laut	12

149	Kabupaten Tapanuli Selatan	23
150	Kabupaten Tapanuli Tengah	27
151	Kabupaten Tapanuli Utara	14
152	Kabupaten Tasikmalaya	17
153	Kabupaten Tebo	16
154	Kabupaten Tegal	11
155	Kabupaten Temanggung	5
156	Kabupaten Timor Tengah Selatan	19
157	Kabupaten Timor Tengah Utara	8
158	Kabupaten Tolitoli	22
159	Kabupaten Toraja Utara	18
160	Kabupaten Tuban	22
161	Kabupaten Tulang Bawang	23
162	Kabupaten Way Kanan	42
163	Kota Ambon	35
164	Kota Banda Aceh	20
165	Kota Banjarmasin	8
166	Kota Bogor	12
167	Kota Bontang	17
168	Kota Bukittinggi	27
169	Kota Gunungsitoli	14
170	Kota Jambi	21
171	Kota Langsa	15
172	Kota Lhokseumawe	24
173	Kota Mataram	22
174	Kota Medan	22
175	Kota Pariaman	18
176	Kota Pekalongan	8
177	Kota Pekanbaru	19
178	Kota Pontianak	15
179	Kota Sabang	17
180	Kota Sibolga	18
181	Kota Singkawang	17
182	Kota Subulussalam	17
183	Kota Sungai Penuh	15
184	Kota Surakarta	5
185	Kota Tanjungbalai	18
186	Kota Tanjungpinang	20
187	Kota Tomohon	30

Lampiran 6

Leverage

No	Nama Daerah	Leverage
1	Kabupaten Aceh Barat	0.0162
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	0.0162
3	Kabupaten Aceh Besar	0.0162
4	Kabupaten Aceh Tengah	0.0473
5	Kabupaten Aceh Utara	0.0086
6	Kabupaten Agam	0.0356
7	Kabupaten Alor	0.0014
8	Kabupaten Balangan	0.0091
9	Kabupaten Balikpapan	0.0035
10	Kabupaten Bandung Barat	0.0058
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	0.0084
12	Kabupaten Banggai Laut	0.0362
13	Kabupaten Bangkalan	0.0171
14	Kabupaten Banjar	0.0037
15	Kabupaten Banjarnegara	0.0013
16	Kabupaten Bantul	0.0123
17	Kabupaten Banyumas	0.0256
18	Kabupaten Banyuwangi	0.0608
19	Kabupaten Barru	0.0210
20	Kabupaten Belu	0.0177
21	Kabupaten Bener Meriah	0.0363
22	Kabupaten Bengkalis	0.1030
23	Kabupaten Bengkayang	0.1001
24	Kabupaten Bima	0.0002
25	Kabupaten Bireuen	0.0291
26	Kabupaten Blitar	0.0113
27	Kabupaten Bojonegoro	0.0143
28	Kabupaten Bolaang Mongondow	0.0019
29	Kabupaten Bombana	0.0464
30	Kabupaten Boyolali	0.0074
31	Kabupaten Buleleng	0.0340
32	Kabupaten Bulungan	0.0141

33	Kabupaten Buol	0.0054
34	Kabupaten Buton Tengah	0.0018
35	Kabupaten Buton Utara	0.0851
36	Kabupaten Ciamis	0.0324
37	Kabupaten Cianjur	0.0353
38	Kabupaten Cilacap	0.0110
39	Kabupaten Cirebon	0.0306
40	Kabupaten Dairi	0.0127
41	Kabupaten Demak	0.0293
42	Kabupaten Dharmasraya	0.0131
43	Kabupaten Dompu	0.0152
44	Kabupaten Flores Timur	0.0069
45	Kabupaten Gayo Lues	0.0074
46	Kabupaten Gorontalo	0.2391
47	Kabupaten Gowa	0.0449
48	Kabupaten Gresik	0.0106
49	Kabupaten Grobogan	0.0035
50	Kabupaten Gunung Mas	0.0015
51	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0.0162
52	Kabupaten Indramayu	0.0154
53	Kabupaten Jayapura	0.0427
54	Kabupaten Jember	0.0214
55	Kabupaten Jepara	0.0084
56	Kabupaten Jombang	0.0144
57	Kabupaten Kapuas	0.0130
58	Kabupaten Kapuas Hulu	0.0106
59	Kabupaten Karanganyar	0.0094
60	Kabupaten Karawang	0.0147
61	Kabupaten Katingan	0.0058
62	Kabupaten Kaur	0.0156
63	Kabupaten Kebumen	0.0200
64	Kabupaten Kepulauan Anambas	0.0539
65	Kabupaten Kepulauan Sangihe	0.1160
66	Kabupaten Klaten	0.0067
67	Kabupaten Kolaka	0.0061
68	Kabupaten Konawe Utara	0.0026
69	Kabupaten Kudus	0.0036
70	Kabupaten Kutai Kertanegara	0.0202
71	Kabupaten Lamandau	0.0110

72	Kabupaten Lamongan	0.0028
73	Kabupaten Lampung Barat	0.0197
74	Kabupaten Lampung Tengah	0.0292
75	Kabupaten Lampung Timur	0.0573
76	Kabupaten Lombok Barat	0.0212
77	Kabupaten Lombok Tengah	0.0596
78	Kabupaten Lumajang	0.0128
79	Kabupaten Madiun	0.0047
80	Kabupaten Magetan	0.0067
81	Kabupaten Majalengka	0.0234
82	Kabupaten Mandailing Natal	0.0033
83	Kabupaten Manggarai	0.0019
84	Kabupaten Manggarai Barat	0.0019
85	Kabupaten Manggarai Timur	0.0019
86	Kabupaten Mempawah	0.0071
87	Kabupaten Merangin	0.0149
88	Kabupaten Morowali	0.0339
89	Kabupaten Muara Enim	0.0094
90	Kabupaten Musi Banyuasin	0.0706
91	Kabupaten Musi Rawas	0.0046
92	Kabupaten Nagekeo	0.0141
93	Kabupaten Ngada	0.0052
94	Kabupaten Nganjuk	0.0166
95	Kabupaten Ngawi	0.0138
96	Kabupaten Nias	0.0279
97	Kabupaten Ogan Ilir	0.0230
98	Kabupaten Padang Pariaman	0.0048
99	Kabupaten Pakpak Barat	0.0073
100	Kabupaten Pamekasan	0.0358
101	Kabupaten Pangandaran	0.1760
102	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	0.0290
103	Kabupaten Parigi Moutong	0.0278
104	Kabupaten Pasaman	0.0205
105	Kabupaten Pasuruan	0.0129
106	Kabupaten Pelalawan	0.0026
107	Kabupaten Pematang	0.0137
108	Kabupaten Penajam Paser Utara	0.0164
109	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	0.0036

110	Kabupaten Pesisir Barat	0.0590
111	Kabupaten Pidie Jaya	0.0394
112	Kabupaten Polewali Mandar	0.0486
113	Kabupaten Ponorogo	0.0585
114	Kabupaten Poso	0.0119
115	Kabupaten Probolinggo	0.0098
116	Kabupaten Pulang Pisau	0.0133
117	Kabupaten Pulau Morotai	0.1000
118	Kabupaten Purwakarta	0.0443
119	Kabupaten Purworejo	0.0000
120	Kabupaten Rejang Lebong	0.0141
121	Kabupaten Rembang	0.0217
122	Kabupaten Rokan Hulu	0.0363
123	Kabupaten Rote Ndao	0.0058
124	Kabupaten Sabu Raijua	0.0033
125	Kabupaten Samosir	0.0071
126	Kabupaten Sanggau	0.0087
127	Kabupaten Sarolangun	0.0014
128	Kabupaten Sekadau	0.0076
129	Kabupaten Seram Bagian Timur	0.0063
130	Kabupaten Serang	0.0310
131	Kabupaten Siak	0.0639
132	Kabupaten Sidenreng Rappang	0.0253
133	Kabupaten Sidoarjo	0.0089
134	Kabupaten Sintang	0.0040
135	Kabupaten Situbondo	0.0087
136	Kabupaten Sleman	0.0007
137	Kabupaten Solok	0.0103
138	Kabupaten Subang	0.0140
139	Kabupaten Sukamara	0.0000
140	Kabupaten Sukoharjo	0.0026
141	Kabupaten Sumba Timur	0.0029
142	Kabupaten Sumedang	0.0181
143	Kabupaten Sumenep	0.0136
144	Kabupaten Tabanan	0.0583
145	Kabupaten Tana Tidung	0.0395
146	Kabupaten Tana Toraja	0.0101
147	Kabupaten Tanah Bumbu	0.0059
148	Kabupaten Tanah Laut	0.0206

149	Kabupaten Tapanuli Selatan	0.0060
150	Kabupaten Tapanuli Tengah	0.0383
151	Kabupaten Tapanuli Utara	0.1378
152	Kabupaten Tasikmalaya	0.0324
153	Kabupaten Tebo	0.0504
154	Kabupaten Tegal	0.0151
155	Kabupaten Temanggung	0.0238
156	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0.0095
157	Kabupaten Timor Tengah Utara	0.0103
158	Kabupaten Tolitoli	0.0067
159	Kabupaten Toraja Utara	0.0094
160	Kabupaten Tuban	0.0032
161	Kabupaten Tulang Bawang	0.0277
162	Kabupaten Way Kanan	0.0233
163	Kota Ambon	0.0743
164	Kota Banda Aceh	0.0029
165	Kota Banjarmasin	0.0094
166	Kota Bogor	0.0160
167	Kota Bontang	0.0057
168	Kota Bukittinggi	0.0300
169	Kota Gunungsitoli	0.0046
170	Kota Jambi	0.0068
171	Kota Langsa	0.0338
172	Kota Lhokseumawe	0.0224
173	Kota Mataram	0.0225
174	Kota Medan	0.0101
175	Kota Pariaman	0.0066
176	Kota Pekalongan	0.0034
177	Kota Pekanbaru	0.0611
178	Kota Pontianak	0.0077
179	Kota Sabang	0.0101
180	Kota Sibolga	0.0666
181	Kota Singkawang	0.0745
182	Kota Subulussalam	0.2035
183	Kota Sungai Penuh	0.0120
184	Kota Surakarta	0.0043
185	Kota Tanjungbalai	0.0342
186	Kota Tanjungpinang	0.0344
187	Kota Tomohon	0.0756

Lampiran 7

Luas Daerah

No	Nama Daerah	Total Aset
1	Kabupaten Aceh Barat	3,840,287,943,060.86
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	2,089,525,843,258.21
3	Kabupaten Aceh Besar	3,096,822,856,001.87
4	Kabupaten Aceh Tengah	2,479,498,511,453.22
5	Kabupaten Aceh Utara	5,410,106,980,534.31
6	Kabupaten Agam	2,186,132,421,510.50
7	Kabupaten Alor	2,212,958,715,020.01
8	Kabupaten Balangan	6,614,844,548,126.52
9	Kabupaten Balikpapan	14,867,479,671,916.30
10	Kabupaten Bandung Barat	4,905,205,065,259.38
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	2,182,732,509,033.77
12	Kabupaten Banggai Laut	1,278,712,505,999.82
13	Kabupaten Bangkalan	3,740,350,658,714.10
14	Kabupaten Banjar	5,159,758,783,346.22
15	Kabupaten Banjarnegara	951,342,769,068.00
16	Kabupaten Bantul	3,769,487,925,940.09
17	Kabupaten Banyumas	7,719,618,434,319.69
18	Kabupaten Banyuwangi	5,150,465,482,967.34
19	Kabupaten Barru	2,152,417,869,512.54
20	Kabupaten Belu	1,687,311,886,600.28
21	Kabupaten Bener Meriah	1,656,307,573,462.84
22	Kabupaten Bengkalis	9,951,988,329,757.33
23	Kabupaten Bengkayang	2,423,975,161,062.58
24	Kabupaten Bima	2,144,267,310,863.53
25	Kabupaten Bireuen	3,486,205,109,937.23
26	Kabupaten Blitar	4,852,415,849,162.43
27	Kabupaten Bojonegoro	17,953,172,205,694.70
28	Kabupaten Bolaang Mongondow	1,897,263,718,217.52
29	Kabupaten Bombana	2,321,222,117,791.33
30	Kabupaten Boyolali	4,950,337,968,668.38
31	Kabupaten Buleleng	3,251,141,773,122.34
32	Kabupaten Bulungan	6,898,900,259,747.91

33	Kabupaten Buol	1,918,278,821,497.22
34	Kabupaten Buton Tengah	2,110,034,904,130.22
35	Kabupaten Buton Utara	1,763,249,568,421.48
36	Kabupaten Ciamis	4,245,041,567,082.07
37	Kabupaten Cianjur	6,744,177,352,852.93
38	Kabupaten Cilacap	6,966,487,284,458.32
39	Kabupaten Cirebon	4,022,065,606,497.18
40	Kabupaten Dairi	1,740,413,199,648.87
41	Kabupaten Demak	5,851,956,608,490.31
42	Kabupaten Dharmasraya	2,452,898,457,443.96
43	Kabupaten Dompu	2,100,506,558,318.51
44	Kabupaten Flores Timur	1,364,003,371,638.43
45	Kabupaten Gayo Lues	2,077,426,292,755.34
46	Kabupaten Gorontalo	1,916,390,714,219.68
47	Kabupaten Gowa	4,659,836,505,616.44
48	Kabupaten Gresik	7,244,064,023,051.83
49	Kabupaten Grobogan	5,093,812,726,328.77
50	Kabupaten Gunung Mas	2,027,431,864,657.04
51	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4,629,307,417,176.01
52	Kabupaten Indramayu	6,305,306,432,652.60
53	Kabupaten Jayapura	3,356,154,556,767.44
54	Kabupaten Jember	6,686,205,424,001.62
55	Kabupaten Jepara	6,641,116,234,802.20
56	Kabupaten Jombang	3,969,032,440,469.68
57	Kabupaten Kapuas	6,455,025,011,229.26
58	Kabupaten Kapuas Hulu	3,226,442,933,870.70
59	Kabupaten Karanganyar	6,149,389,872,222.37
60	Kabupaten Karawang	10,719,406,650,882.90
61	Kabupaten Katingan	3,428,072,450,255.13
62	Kabupaten Kaur	1,469,820,970,689.60
63	Kabupaten Kebumen	4,798,800,949,629.06
64	Kabupaten Kepulauan Anambas	1,862,320,417,152.63
65	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1,903,034,498,482.74
66	Kabupaten Klaten	3,483,556,824,972.77
67	Kabupaten Kolaka	3,387,667,316,152.86
68	Kabupaten Konawe Utara	2,847,965,300,548.99
69	Kabupaten Kudus	5,105,484,009,287.10
70	Kabupaten Kutai Kertanegara	26,006,463,209,083.20
71	Kabupaten Lamandau	1,921,442,023,082.35

72	Kabupaten Lamongan	5,935,136,785,543.48
73	Kabupaten Lampung Barat	2,918,620,969,589.86
74	Kabupaten Lampung Tengah	4,159,790,454,658.65
75	Kabupaten Lampung Timur	2,430,842,669,030.81
76	Kabupaten Lombok Barat	3,513,915,766,775.53
77	Kabupaten Lombok Tengah	4,162,915,996,549.77
78	Kabupaten Lumajang	3,366,199,570,586.54
79	Kabupaten Madiun	4,652,198,866,460.79
80	Kabupaten Magetan	2,446,923,664,046.18
81	Kabupaten Majalengka	5,694,260,410,831.48
82	Kabupaten Mandailing Natal	2,141,980,691,602.66
83	Kabupaten Manggarai	2,058,948,671,872.87
84	Kabupaten Manggarai Barat	2,058,948,671,872.87
85	Kabupaten Manggarai Timur	2,058,948,671,872.87
86	Kabupaten Mempawah	1,631,437,609,330.39
87	Kabupaten Merangin	2,551,260,523,024.58
88	Kabupaten Morowali	4,484,724,310,204.90
89	Kabupaten Muara Enim	8,695,314,786,137.32
90	Kabupaten Musi Banyuasin	8,533,883,978,894.68
91	Kabupaten Musi Rawas	4,474,421,882,663.26
92	Kabupaten Nagekeo	2,073,084,541,084.75
93	Kabupaten Ngada	1,795,614,983,030.16
94	Kabupaten Nganjuk	4,054,106,084,390.54
95	Kabupaten Ngawi	4,256,903,032,065.52
96	Kabupaten Nias	1,632,375,782,533.54
97	Kabupaten Ogan Ilir	3,298,985,617,928.00
98	Kabupaten Padang Pariaman	1,348,585,184,539.73
99	Kabupaten Pakpak Barat	1,116,119,672,621.18
100	Kabupaten Pamekasan	3,643,099,326,134.73
101	Kabupaten Pangandaran	2,515,257,713,341.70
102	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	2,040,431,119,143.96
103	Kabupaten Parigi Moutong	2,736,129,310,342.74
104	Kabupaten Pasaman	1,917,092,332,480.26
105	Kabupaten Pasuruan	4,539,758,085,983.36
106	Kabupaten Pelalawan	4,097,642,461,323.39
107	Kabupaten Pematang	3,888,702,058,486.30
108	Kabupaten Penajam Paser Utara	5,780,327,092,789.49
109	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	3,515,302,096,339.49
110	Kabupaten Pesisir Barat	1,873,380,202,838.23

111	Kabupaten Pidie Jaya	1,763,674,554,824.83
112	Kabupaten Polewali Mandar	2,529,280,250,005.11
113	Kabupaten Ponorogo	3,294,082,300,417.04
114	Kabupaten Poso	2,570,667,435,766.78
115	Kabupaten Probolinggo	2,256,399,931,838.55
116	Kabupaten Pulang Pisau	2,088,560,373,802.37
117	Kabupaten Pulau Morotai	2,231,003,408,389.06
118	Kabupaten Purwakarta	3,095,743,952,952.00
119	Kabupaten Purworejo	3,336,279,081,901.00
120	Kabupaten Rejang Lebong	1,583,149,971,345.30
121	Kabupaten Rembang	2,755,464,819,841.97
122	Kabupaten Rokan Hulu	3,893,463,179,761.62
123	Kabupaten Rote Ndao	1,777,196,894,723.47
124	Kabupaten Sabu Raijua	1,480,528,549,051.72
125	Kabupaten Samosir	1,866,702,323,296.30
126	Kabupaten Sanggau	3,580,754,211,118.18
127	Kabupaten Sarolangun	2,407,275,104,640.17
128	Kabupaten Sekadau	2,126,964,752,611.14
129	Kabupaten Seram Bagian Timur	1,631,717,839,288.64
130	Kabupaten Serang	4,934,230,224,204.46
131	Kabupaten Siak	611,604,713,025.30
132	Kabupaten Sidenreng Rappang	2,581,395,328,266.25
133	Kabupaten Sidoarjo	23,213,233,721,800.60
134	Kabupaten Sintang	5,261,430,064,023.26
135	Kabupaten Situbondo	4,421,280,015,557.35
136	Kabupaten Sleman	6,666,573,218,700.03
137	Kabupaten Solok	1,906,145,703,474.11
138	Kabupaten Subang	5,441,440,029,291.23
139	Kabupaten Sukamara	5,200,554,530,733.22
140	Kabupaten Sukoharjo	6,651,105,090,226.13
141	Kabupaten Sumba Timur	2,837,596,689,439.20
142	Kabupaten Sumedang	3,810,555,103,851.04
143	Kabupaten Sumenep	3,909,587,955,429.62
144	Kabupaten Tabanan	3,274,218,361,421.38
145	Kabupaten Tana Tidung	3,752,828,955,536.36
146	Kabupaten Tana Toraja	3,258,634,321,029.91
147	Kabupaten Tanah Bumbu	8,849,429,034,346.15
148	Kabupaten Tanah Laut	5,984,645,528,708.99
149	Kabupaten Tapanuli Selatan	3,341,593,369,762.54

150	Kabupaten Tapanuli Tengah	2,045,058,317,174.91
151	Kabupaten Tapanuli Utara	2,584,660,729,547.97
152	Kabupaten Tasikmalaya	4,245,041,567,082.07
153	Kabupaten Tebo	3,029,596,217,355.43
154	Kabupaten Tegal	4,076,288,864,746.49
155	Kabupaten Temanggung	3,322,211,234,323.78
156	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2,455,877,824,272.12
157	Kabupaten Timor Tengah Utara	1,749,493,832,833.76
158	Kabupaten Tolitoli	2,421,689,608,998.87
159	Kabupaten Toraja Utara	9,414,188,845,925.28
160	Kabupaten Tuban	8,575,732,881,892.13
161	Kabupaten Tulang Bawang	1,949,702,663,320.18
162	Kabupaten Way Kanan	2,895,742,983,847.08
163	Kota Ambon	2,090,534,894,401.07
164	Kota Banda Aceh	3,324,291,101,605.17
165	Kota Banjarmasin	7,434,281,828,193.40
166	Kota Bogor	10,904,646,013,978.50
167	Kota Bontang	6,604,475,107,766.60
168	Kota Bukittinggi	1,924,839,952,993.70
169	Kota Gunungsitoli	1,974,697,488,756.20
170	Kota Jambi	5,253,009,937,733.09
171	Kota Langsa	2,264,823,069,317.58
172	Kota Lhokseumawe	2,088,111,046,799.41
173	Kota Mataram	4,181,047,596,384.61
174	Kota Medan	38,568,706,399,913.70
175	Kota Pariaman	300,407,443,658.41
176	Kota Pekalongan	3,511,173,209,341.43
177	Kota Pekanbaru	8,124,178,308,532.39
178	Kota Pontianak	10,210,797,121,467.40
179	Kota Sabang	1,521,293,372,754.79
180	Kota Sibolga	1,738,799,122,434.93
181	Kota Singkawang	2,517,095,350,577.50
182	Kota Subulussalam	1,531,979,862,996.33
183	Kota Sungai Penuh	1,722,047,608,264.27
184	Kota Surakarta	13,897,359,436,972.50
185	Kota Tanjungbalai	1,531,979,862,996.33
186	Kota Tanjungpinang	2,187,172,741,390.22
187	Kota Tomohon	1,708,952,360,478.42

Lampiran 8

Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

No	Nama Daerah	Tingkat Pendidikan
1	Kabupaten Aceh Barat	3
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	4
3	Kabupaten Aceh Besar	3
4	Kabupaten Aceh Tengah	4
5	Kabupaten Aceh Utara	4
6	Kabupaten Agam	4
7	Kabupaten Alor	4
8	Kabupaten Balangan	4
9	Kabupaten Balikpapan	4
10	Kabupaten Bandung Barat	3
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	4
12	Kabupaten Banggai Laut	3
13	Kabupaten Bangkalan	4
14	Kabupaten Banjar	3
15	Kabupaten Banjarnegara	4
16	Kabupaten Bantul	4
17	Kabupaten Banyumas	4
18	Kabupaten Banyuwangi	4
19	Kabupaten Barru	4
20	Kabupaten Belu	4
21	Kabupaten Bener Meriah	4
22	Kabupaten Bengkalis	4
23	Kabupaten Bengkayang	4
24	Kabupaten Bima	4
25	Kabupaten Bireuen	4
26	Kabupaten Blitar	2
27	Kabupaten Bojonegoro	4
28	Kabupaten Bolaang Mongondow	4
29	Kabupaten Bombana	4
30	Kabupaten Boyolali	3
31	Kabupaten Buleleng	4
32	Kabupaten Bulungan	4

33	Kabupaten Buol	4
34	Kabupaten Buton Tengah	4
35	Kabupaten Buton Utara	3
36	Kabupaten Ciamis	4
37	Kabupaten Cianjur	4
38	Kabupaten Cilacap	4
39	Kabupaten Cirebon	4
40	Kabupaten Dairi	4
41	Kabupaten Demak	4
42	Kabupaten Dharmasraya	3
43	Kabupaten Dompu	1
44	Kabupaten Flores Timur	4
45	Kabupaten Gayo Lues	4
46	Kabupaten Gorontalo	4
47	Kabupaten Gowa	4
48	Kabupaten Gresik	4
49	Kabupaten Grobogan	4
50	Kabupaten Gunung Mas	4
51	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4
52	Kabupaten Indramayu	4
53	Kabupaten Jayapura	4
54	Kabupaten Jember	4
55	Kabupaten Jepara	4
56	Kabupaten Jombang	4
57	Kabupaten Kapuas	4
58	Kabupaten Kapuas Hulu	4
59	Kabupaten Karanganyar	4
60	Kabupaten Karawang	4
61	Kabupaten Katingan	4
62	Kabupaten Kaur	4
63	Kabupaten Kebumen	4
64	Kabupaten Kepulauan Anambas	3
65	Kabupaten Kepulauan Sangihe	4
66	Kabupaten Klaten	4
67	Kabupaten Kolaka	4
68	Kabupaten Konawe Utara	4
69	Kabupaten Kudus	4
70	Kabupaten Kutai Kertanegara	4
71	Kabupaten Lamandau	4

72	Kabupaten Lamongan	4
73	Kabupaten Lampung Barat	4
74	Kabupaten Lampung Tengah	4
75	Kabupaten Lampung Timur	4
76	Kabupaten Lombok Barat	4
77	Kabupaten Lombok Tengah	3
78	Kabupaten Lumajang	4
79	Kabupaten Madiun	4
80	Kabupaten Magetan	4
81	Kabupaten Majalengka	4
82	Kabupaten Mandailing Natal	1
83	Kabupaten Manggarai	4
84	Kabupaten Manggarai Barat	3
85	Kabupaten Manggarai Timur	4
86	Kabupaten Mempawah	4
87	Kabupaten Merangin	4
88	Kabupaten Morowali	3
89	Kabupaten Muara Enim	4
90	Kabupaten Musi Banyuasin	4
91	Kabupaten Musi Rawas	3
92	Kabupaten Nagekeo	4
93	Kabupaten Ngada	4
94	Kabupaten Nganjuk	4
95	Kabupaten Ngawi	4
96	Kabupaten Nias	4
97	Kabupaten Ogan Ilir	4
98	Kabupaten Padang Pariaman	4
99	Kabupaten Pakpak Barat	1
100	Kabupaten Pamekasan	4
101	Kabupaten Pangandaran	3
102	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	4
103	Kabupaten Parigi Moutong	4
104	Kabupaten Pasaman	4
105	Kabupaten Pasuruan	4
106	Kabupaten Pelalawan	4
107	Kabupaten Pematang	3
108	Kabupaten Penajam Paser Utara	4
109	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4
110	Kabupaten Pesisir Barat	4

111	Kabupaten Pidie Jaya	4
112	Kabupaten Polewali Mandar	2
113	Kabupaten Ponorogo	4
114	Kabupaten Poso	4
115	Kabupaten Probolinggo	4
116	Kabupaten Pulang Pisau	4
117	Kabupaten Pulau Morotai	3
118	Kabupaten Purwakarta	4
119	Kabupaten Purworejo	3
120	Kabupaten Rejang Lebong	4
121	Kabupaten Rembang	3
122	Kabupaten Rokan Hulu	1
123	Kabupaten Rote Ndao	3
124	Kabupaten Sabu Raijua	4
125	Kabupaten Samosir	4
126	Kabupaten Sanggau	4
127	Kabupaten Sarolangun	4
128	Kabupaten Sekadau	3
129	Kabupaten Seram Bagian Timur	4
130	Kabupaten Serang	4
131	Kabupaten Siak	4
132	Kabupaten Sidenreng Rappang	4
133	Kabupaten Sidoarjo	4
134	Kabupaten Sintang	4
135	Kabupaten Situbondo	4
136	Kabupaten Sleman	3
137	Kabupaten Solok	4
138	Kabupaten Subang	4
139	Kabupaten Sukamara	4
140	Kabupaten Sukoharjo	4
141	Kabupaten Sumba Timur	4
142	Kabupaten Sumedang	4
143	Kabupaten Sumenep	4
144	Kabupaten Tabanan	4
145	Kabupaten Tana Tidung	2
146	Kabupaten Tana Toraja	3
147	Kabupaten Tanah Bumbu	4
148	Kabupaten Tanah Laut	4
149	Kabupaten Tapanuli Selatan	4

150	Kabupaten Tapanuli Tengah	4
151	Kabupaten Tapanuli Utara	4
152	Kabupaten Tasikmalaya	3
153	Kabupaten Tebo	4
154	Kabupaten Tegal	4
155	Kabupaten Temanggung	4
156	Kabupaten Timor Tengah Selatan	4
157	Kabupaten Timor Tengah Utara	3
158	Kabupaten Tolitoli	1
159	Kabupaten Toraja Utara	4
160	Kabupaten Tuban	3
161	Kabupaten Tulang Bawang	4
162	Kabupaten Way Kanan	4
163	Kota Ambon	4
164	Kota Banda Aceh	4
165	Kota Banjarmasin	4
166	Kota Bogor	4
167	Kota Bontang	4
168	Kota Bukittinggi	3
169	Kota Gunungsitoli	4
170	Kota Jambi	4
171	Kota Langsa	4
172	Kota Lhokseumawe	4
173	Kota Mataram	4
174	Kota Medan	4
175	Kota Pariaman	4
176	Kota Pekalongan	4
177	Kota Pekanbaru	4
178	Kota Pontianak	4
179	Kota Sabang	4
180	Kota Sibolga	1
181	Kota Singkawang	4
182	Kota Subulussalam	4
183	Kota Sungai Penuh	4
184	Kota Surakarta	3
185	Kota Tanjungbalai	4
186	Kota Tanjungpinang	4
187	Kota Tomohon	3

Lampiran 9

Kemandirian Fiskal Daerah

No	Nama Daerah	PAD 2024	Tot. Pendapatan Daerah	Rasio
1	Kabupaten Aceh Barat	186,570,000,000.00	1,611,090,000,000.00	0.12
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	135,550,000,000.00	935,690,000,000.00	0.14
3	Kabupaten Aceh Besar	178,130,000,000.00	1,862,090,000,000.00	0.10
4	Kabupaten Aceh Tengah	165,260,000,000.00	1,383,720,000,000.00	0.12
5	Kabupaten Aceh Utara	265,260,000,000.00	2,592,990,000,000.00	0.10
6	Kabupaten Agam	164,720,000,000.00	1,526,670,000,000.00	0.11
7	Kabupaten Alor	69,200,000,000.00	1,113,510,000,000.00	0.06
8	Kabupaten Balangan	175,900,000,000.00	4,326,130,000,000.00	0.04
9	Kabupaten Balikpapan	1,132,640,000,000.00	4,020,540,000,000.00	0.28
10	Kabupaten Bandung Barat	799,930,000,000.00	3,410,490,000,000.00	0.23

11	Kabupaten Banggai Kepulauan	51,950,000,000.00	1,027,930,000,000.00	0.05
12	Kabupaten Banggai Laut	40,380,000,000.00	777,250,000,000.00	0.05
13	Kabupaten Bangkalan	414,120,000,000.00	2,421,930,000,000.00	0.17
14	Kabupaten Banjar	315,770,000,000.00	2,990,460,000,000.00	0.11
15	Kabupaten Banjarnegara	385,230,000,000.00	2,340,250,000,000.00	0.16
16	Kabupaten Bantul	638,570,000,000.00	2,609,410,000,000.00	0.24
17	Kabupaten Banyumas	903,570,000,000.00	3,793,670,000,000.00	0.24
18	Kabupaten Banyuwangi	597,540,000,000.00	3,370,330,000,000.00	0.18
19	Kabupaten Barru	111,780,000,000.00	914,280,000,000.00	0.12
20	Kabupaten Belu	88,070,000,000.00	977,450,000,000.00	0.09
21	Kabupaten Bener Meriah	97,250,000,000.00	1,056,460,000,000.00	0.09
22	Kabupaten Bengkalis	411,660,000,000.00	3,533,500,000,000.00	0.12
23	Kabupaten Bengkayang	84,080,000,000.00	1,188,480,000,000.00	0.07
24	Kabupaten Bima	240,150,000,000.00	2,090,720,000,000.00	0.11

25	Kabupaten Bireuen	222,330,000,000.00	2,029,040,000,000.00	0.11
26	Kabupaten Blitar	452,660,000,000.00	2,664,280,000,000.00	0.17
27	Kabupaten Bojonegoro	1,022,400,000,000.00	5,724,240,000,000.00	0.18
28	Kabupaten Bolaang Mongondow	73,140,000,000.00	1,060,000,000,000.00	0.07
29	Kabupaten Bombana	697,850,000,000.00	3,322,210,000,000.00	0.21
30	Kabupaten Boyolali	538,700,000,000.00	2,455,460,000,000.00	0.22
31	Kabupaten Buleleng	544,580,000,000.00	2,534,670,000,000.00	0.21
32	Kabupaten Bulungan	225,890,000,000.00	2,121,640,000,000.00	0.11
33	Kabupaten Buol	97,820,000,000.00	1,068,280,000,000.00	0.09
34	Kabupaten Buton Tengah	30,260,000,000.00	738,170,000,000.00	0.04
35	Kabupaten Buton Utara	32,850,000,000.00	785,300,000,000.00	0.04
36	Kabupaten Ciamis	311,980,000,000.00	2,820,120,000,000.00	0.11
37	Kabupaten Cianjur	835,500,000,000.00	4,604,510,000,000.00	0.18
38	Kabupaten Cilacap	884,440,000,000.00	3,842,570,000,000.00	0.23

39	Kabupaten Cirebon	772,490,000,000.00	4,464,640,000,000.00	0.17
40	Kabupaten Dairi	112,520,000,000.00	1,195,820,000,000.00	0.09
41	Kabupaten Demak	594,890,000,000.00	2,704,170,000,000.00	0.22
42	Kabupaten Dharmasraya	120,060,000,000.00	970,820,000,000.00	0.12
43	Kabupaten Dompu	211,360,000,000.00	1,312,170,000,000.00	0.16
44	Kabupaten Flores Timur	68,620,000,000.00	1,290,260,000,000.00	0.05
45	Kabupaten Gayo Lues	68,340,000,000.00	847,450,000,000.00	0.08
46	Kabupaten Gorontalo	164,770,000,000.00	1,471,890,000,000.00	0.11
47	Kabupaten Gowa	341,180,000,000.00	2,084,320,000,000.00	0.16
48	Kabupaten Gresik	1,385,030,000,000.00	3,730,420,000,000.00	0.37
49	Kabupaten Grobogan	492,630,000,000.00	2,924,890,000,000.00	0.17
50	Kabupaten Gunung Mas	64,830,000,000.00	1,441,540,000,000.00	0.04
51	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	228,890,000,000.00	1,938,420,000,000.00	0.12
52	Kabupaten Indramayu	651,640,000,000.00	3,650,580,000,000.00	0.18

53	Kabupaten Jayapura	128,010,000,000.00	1,498,090,000,000.00	0.09
54	Kabupaten Jember	774,170,000,000.00	4,129,090,000,000.00	0.19
55	Kabupaten Jepara	497,780,000,000.00	2,549,840,000,000.00	0.20
56	Kabupaten Jombang	634,640,000,000.00	2,990,210,000,000.00	0.21
57	Kabupaten Kapuas	224,960,000,000.00	3,217,750,000,000.00	0.07
58	Kabupaten Kapuas Hulu	92,320,000,000.00	1,829,270,000,000.00	0.05
59	Kabupaten Karanganyar	453,870,000,000.00	2,519,420,000,000.00	0.18
60	Kabupaten Karawang	1,826,280,000,000.00	5,686,620,000,000.00	0.32
61	Kabupaten Katingan	75,850,000,000.00	1,585,200,000,000.00	0.05
62	Kabupaten Kaur	39,310,000,000.00	2,137,620,000,000.00	0.02
63	Kabupaten Kebumen	484,290,000,000.00	3,137,690,000,000.00	0.15
64	Kabupaten Kepulauan Anambas	35,700,000,000.00	809,510,000,000.00	0.04
65	Kabupaten Kepulauan Sangihe	85,100,000,000.00	1,004,430,000,000.00	0.08
66	Kabupaten Klaten	372,120,000,000.00	2,769,790,000,000.00	0.13

67	Kabupaten Kolaka	189,280,000,000.00	1,783,410,000,000.00	0.11
68	Kabupaten Konawe Utara	74,420,000,000.00	2,137,620,000,000.00	0.03
69	Kabupaten Kudus	550,450,000,000.00	2,291,720,000,000.00	0.24
70	Kabupaten Kutai Kertanegara	865,930,000,000.00	12,702,150,000,000.00	0.07
71	Kabupaten Lamandau	87,780,000,000.00	1,090,010,000,000.00	0.08
72	Kabupaten Lamongan	559,460,000,000.00	3,299,250,000,000.00	0.17
73	Kabupaten Lampung Barat	71,820,000,000.00	1,111,190,000,000.00	0.06
74	Kabupaten Lampung Tengah	239,940,000,000.00	2,708,770,000,000.00	0.09
75	Kabupaten Lampung Timur	207,570,000,000.00	2,337,110,000,000.00	0.09
76	Kabupaten Lombok Barat	478,010,000,000.00	2,119,110,000,000.00	0.23
77	Kabupaten Lombok Tengah	440,110,000,000.00	2,729,660,000,000.00	0.16
78	Kabupaten Lumajang	393,570,000,000.00	2,293,900,000,000.00	0.17
79	Kabupaten Madiun	343,010,000,000.00	2,207,540,000,000.00	0.16
80	Kabupaten Magetan	283,750,000,000.00	2,027,540,000,000.00	0.14

81	Kabupaten Majalengka	530,220,000,000.00	3,137,440,000,000.00	0.17
82	Kabupaten Mandailing Natal	145,880,000,000.00	1,887,310,000,000.00	0.08
83	Kabupaten Manggarai	126,040,000,000.00	1,289,100,000,000.00	0.10
84	Kabupaten Manggarai Barat	288,170,000,000.00	1,386,630,000,000.00	0.21
85	Kabupaten Manggarai Timur	41,460,000,000.00	1,231,990,000,000.00	0.03
86	Kabupaten Mempawah	147,446,000,000.00	1,265,000,000,000.00	0.12
87	Kabupaten Merangin	107,270,000,000.00	1,459,280,000,000.00	0.07
88	Kabupaten Morowali	1,049,900,000,000.00	2,966,370,000,000.00	0.35
89	Kabupaten Muara Enim	382,440,000,000.00	3,914,100,000,000.00	0.10
90	Kabupaten Musi Banyuasin	108,200,000,000.00	909,270,000,000.00	0.12
91	Kabupaten Musi Rawas	125,880,000,000.00	2,067,760,000,000.00	0.06
92	Kabupaten Nagekeo	53,380,000,000.00	757,480,000,000.00	0.07
93	Kabupaten Ngada	52,620,000,000.00	1,061,050,000,000.00	0.05
94	Kabupaten Nganjuk	486,210,000,000.00	2,834,720,000,000.00	0.17

95	Kabupaten Ngawi	329,630,000,000.00	2,513,620,000,000.00	0.13
96	Kabupaten Nias	468,240,000,000.00	2,433,530,000,000.00	0.19
97	Kabupaten Ogan Ilir	773,390,000,000.00	4,651,050,000,000.00	0.17
98	Kabupaten Padang Pariaman	144,740,000,000.00	1,427,460,000,000.00	0.10
99	Kabupaten Pakpak Barat	31,780,000,000.00	597,240,000,000.00	0.05
100	Kabupaten Pamekasan	307,370,000,000.00	2,105,850,000,000.00	0.15
101	Kabupaten Pangandaran	240,130,000,000.00	1,433,020,000,000.00	0.17
102	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	251,610,000,000.00	1,545,080,000,000.00	0.16
103	Kabupaten Parigi Moutong	165,440,000,000.00	1,825,830,000,000.00	0.09
104	Kabupaten Pasaman	113,670,000,000.00	1,060,750,000,000.00	0.11
105	Kabupaten Pasuruan	975,520,000,000.00	3,796,900,000,000.00	0.26
106	Kabupaten Pelalawan	189,830,000,000.00	1,729,130,000,000.00	0.11
107	Kabupaten Pematang	402,960,000,000.00	2,755,590,000,000.00	0.15
108	Kabupaten Penajam Paser Utara	241,980,000,000.00	2,863,180,000,000.00	0.08

109	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	64,690,000,000.00	1,495,690,000,000.00	0.04
110	Kabupaten Pesisir Barat	37,740,000,000.00	797,950,000,000.00	0.05
111	Kabupaten Pidie Jaya	117,420,000,000.00	975,470,000,000.00	0.12
112	Kabupaten Polewali Mandar	261,380,000,000.00	1,567,890,000,000.00	0.17
113	Kabupaten Ponorogo	379,430,000,000.00	2,459,750,000,000.00	0.15
114	Kabupaten Poso	133,940,000,000.00	1,517,130,000,000.00	0.09
115	Kabupaten Probolinggo	348,710,000,000.00	2,451,840,000,000.00	0.14
116	Kabupaten Pulang Pisau	71,510,000,000.00	304,080,000,000.00	0.24
117	Kabupaten Pulau Morotai	29,290,000,000.00	841,660,000,000.00	0.03
118	Kabupaten Purwakarta	427,540,000,000.00	1,518,940,000,000.00	0.28
119	Kabupaten Purworejo	448,850,000,000.00	2,408,820,000,000.00	0.19
120	Kabupaten Rejang Lebong	76,460,000,000.00	1,081,650,000,000.00	0.07
121	Kabupaten Rembang	394,990,000,000.00	2,042,040,000,000.00	0.19
122	Kabupaten Rokan Hulu	161,500,000,000.00	1,787,830,000,000.00	0.09

123	Kabupaten Rote Ndao	40,040,000,000.00	869,320,000,000.00	0.05
124	Kabupaten Sabu Raijua	23,980,000,000.00	640,330,000,000.00	0.04
125	Kabupaten Samosir	96,500,000,000.00	911,640,000,000.00	0.11
126	Kabupaten Sanggau	176,130,000,000.00	1,807,270,000,000.00	0.10
127	Kabupaten Sarolangun	64,000,000,000.00	1,300,370,000,000.00	0.05
128	Kabupaten Sekadau	58,800,000,000.00	950,230,000,000.00	0.06
129	Kabupaten Seram Bagian Timur	38,210,000,000.00	990,360,000,000.00	0.04
130	Kabupaten Serang	944,310,000,000.00	3,490,790,000,000.00	0.27
131	Kabupaten Siak	543,490,000,000.00	2,387,130,000,000.00	0.23
132	Kabupaten Sidenreng Rappang	189,590,000,000.00	1,247,490,000,000.00	0.15
133	Kabupaten Sidoarjo	2,353,390,000,000.00	5,333,380,000,000.00	0.44
134	Kabupaten Sintang	179,040,000,000.00	2,088,200,000,000.00	0.09
135	Kabupaten Situbondo	271,680,000,000.00	2,353,390,000,000.00	0.12
136	Kabupaten Sleman	1,184,120,000,000.00	3,238,110,000,000.00	0.37

137	Kabupaten Solok	48,190,000,000.00	574,170,000,000.00	0.08
138	Kabupaten Subang	718,150,000,000.00	3,696,270,000,000.00	0.19
139	Kabupaten Sukamara	48,990,000,000.00	971,460,000,000.00	0.05
140	Kabupaten Sukoharjo	553,600,000,000.00	2,241,420,000,000.00	0.25
141	Kabupaten Sumba Timur	103,780,000,000.00	1,238,760,000,000.00	0.08
142	Kabupaten Sumedang	566,230,000,000.00	3,057,030,000,000.00	0.19
143	Kabupaten Sumenep	304,080,000,000.00	2,670,520,000,000.00	0.11
144	Kabupaten Tabanan	577,240,000,000.00	2,245,670,000,000.00	0.26
145	Kabupaten Tana Tidung	51,330,000,000.00	1,483,900,000,000.00	0.03
146	Kabupaten Tana Toraja	136,690,000,000.00	1,181,620,000,000.00	0.12
147	Kabupaten Tanah Bumbu	338,980,000,000.00	5,012,050,000,000.00	0.07
148	Kabupaten Tanah Laut	238,490,000,000.00	2,589,820,000,000.00	0.09
149	Kabupaten Tapanuli Selatan	145,800,000,000.00	1,523,990,000,000.00	0.10
150	Kabupaten Tapanuli Tengah	107,910,000,000.00	1,250,680,000,000.00	0.09

151	Kabupaten Tapanuli Utara	147,050,000,000.00	1,437,280,000,000.00	0.10
152	Kabupaten Tasikmalaya	351,780,000,000.00	1,792,500,000,000.00	0.20
153	Kabupaten Tebo	97,480,000,000.00	1,254,680,000,000.00	0.08
154	Kabupaten Tegal	602,840,000,000.00	2,993,700,000,000.00	0.20
155	Kabupaten Temanggung	388,860,000,000.00	2,101,480,000,000.00	0.19
156	Kabupaten Timor Tengah Selatan	54,260,000,000.00	1,484,750,000,000.00	0.04
157	Kabupaten Timor Tengah Utara	63,190,000,000.00	1,133,650,000,000.00	0.06
158	Kabupaten Tolitoli	143,070,000,000.00	1,274,200,000,000.00	0.11
159	Kabupaten Toraja Utara	64,480,000,000.00	1,154,300,000,000.00	0.06
160	Kabupaten Tuban	783,800,000,000.00	3,477,640,000,000.00	0.23
161	Kabupaten Tulang Bawang	121,100,000,000.00	1,256,370,000,000.00	0.10
162	Kabupaten Way Kanan	84,730,000,000.00	1,426,220,000,000.00	0.06
163	Kota Ambon	194,980,000,000.00	1,195,320,000,000.00	0.16
164	Kota Banda Aceh	324,510,000,000.00	1,348,290,000,000.00	0.24

165	Kota Banjarmasin	523,950,000,000.00	2,496,710,000,000.00	0.21
166	Kota Bogor	1,458,620,000,000.00	3,170,500,000,000.00	0.46
167	Kota Bontang	395,440,000,000.00	2,817,670,000,000.00	0.14
168	Kota Bukittinggi	130,110,000,000.00	741,380,000,000.00	0.18
169	Kota Gunungsitoli	35,930,000,000.00	739,380,000,000.00	0.05
170	Kota Jambi	455,260,000,000.00	1,765,180,000,000.00	0.26
171	Kota Langsa	203,210,000,000.00	967,360,000,000.00	0.21
172	Kota Lhokseumawe	74,280,000,000.00	792,390,000,000.00	0.09
173	Kota Mataram	598,930,000,000.00	1,823,870,000,000.00	0.33
174	Kota Medan	2,864,360,000,000.00	6,294,920,000,000.00	0.46
175	Kota Pariaman	45,910,000,000.00	644,360,000,000.00	0.07
176	Kota Pekalongan	271,120,000,000.00	1,016,320,000,000.00	0.27
177	Kota Pekanbaru	923,860,000,000.00	2,780,230,000,000.00	0.33
178	Kota Pontianak	593,780,000,000.00	1,937,580,000,000.00	0.31

179	Kota Sabang	36,390,000,000.00	565,570,000,000.00	0.06
180	Kota Sibolga	92,820,000,000.00	645,710,000,000.00	0.14
181	Kota Singkawang	272,080,000,000.00	1,012,780,000,000.00	0.27
182	Kota Subulussalam	45,080,000,000.00	609,820,000,000.00	0.07
183	Kota Sungai Penuh	66,930,000,000.00	793,720,000,000.00	0.08
184	Kota Surakarta	792,400,000,000.00	2,192,650,000,000.00	0.36
185	Kota Tanjungbalai	86,590,000,000.00	651,320,000,000.00	0.13
186	Kota Tanjungpinang	181,530,000,000.00	1,013,750,000,000.00	0.18
187	Kota Tomohon	56,610,000,000.00	700,940,000,000.00	0.08

Lampiran 10

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Penduduk	187	10	15	12.96	.966
Indeks E-Government	187	1.44	4.77	3.2160	.66466
Umur Pemerintah Daerah	187	2	4	3.82	.599
Temuan Audit	187	4	46	19.09	8.241
Leverage	187	.00	.24	.0250	.03310
Luas Daerah	187	26	31	28.83	.654
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	187	1	4	3.72	.654
Kemandirian Fiskal Daerah	187	-3.91	-.78	-2.1370	.62878
Valid N (listwise)	187				

Lampiran 11

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
n		187
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.41034556
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.039
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Jumlah Penduduk	.371	2.698
	Indeks E-Government	.592	1.688
	Umur Pemerintah Daerah	.585	1.711
	Temuan Audit	.968	1.033
	Leverage	.953	1.049
	Luas Daerah	.657	1.523
	Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	.968	1.033

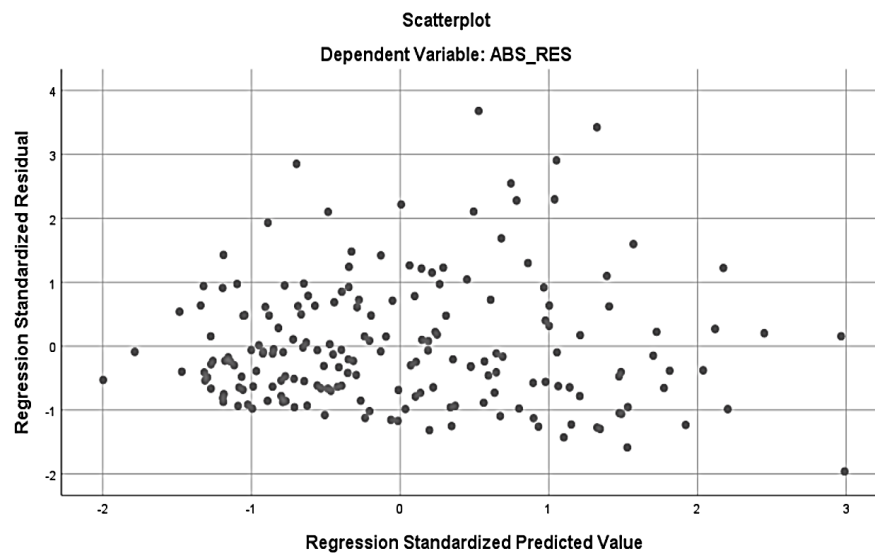
a. Dependent Variable: Kemandirian Fiskal Daerah

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.499	.878		-.568	.571
	Jumlah Penduduk	-.059	.031	-.224	-1.918	.057
	Indeks E-Government	.024	.036	.063	.683	.495
	Umur Pemerintah Daerah	-.073	.040	-.171	-1.838	.068
	Temuan Audit	.002	.002	.076	1.047	.297
	Leverage	-.162	.564	-.021	-.287	.775
	Luas Daerah	.059	.034	.150	1.706	.090
	Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	.016	.028	.040	.558	.577

a. Dependent Variable: ABS_RES



Lampiran 12

Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.116	1.478		-6.167	.000
	Jumlah Penduduk	.193	.052	.296	3.695	.000
	Indeks E-Government	.311	.060	.328	5.183	.000
	Umur Pemerintah Daerah	.201	.067	.191	2.994	.003
	Temuan Audit	-.008	.004	-.107	-2.160	.032
	Leverage	2.192	.949	.115	2.310	.022
	Luas Daerah	.106	.058	.110	1.823	.070
	Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	-.061	.048	-.063	-1.275	.204

a. Dependent Variable: Kemandirian Fiskal Daerah

Lampiran 13

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.574	.557	.41829

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan Kepala Daerah, Temuan Audit, Luas Daerah, Leverage, Umur Pemerintah Daerah, Indeks E-Government, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: Kemandirian Fiskal Daerah

Lampiran 14

Hasil Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (T)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-9.116	1.478		.000
	Jumlah Penduduk	.193	.052	.296	.000
	Indeks E-Government	.311	.060	.328	.000
	Umur Pemerintah Daerah	.201	.067	.191	.003
	Temuan Audit	-.008	.004	-.107	.032
	Leverage	2.192	.949	.115	.022
	Luas Daerah	.106	.058	.110	.070
	Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	-.061	.048	-.063	.204

a. Dependent Variable: Kemandirian Fiskal Daerah